

LAPORAN KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2014



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinNya Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 selesai disusun sesuai yang direncanakan.

Laporan Kinerja BKP Tahun 2014 disusun sesuai dengan Permenpan dan RB No.29 Tahun 2010, Permentan No.135 tahun 2013, dan Permenpan RB No. 53 tahun 2014, bahwa setiap unit kerja wajib melaporkan hasil kinerja program, kegiatan dan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Ketahanan Pangan kepada Menteri Pertanian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi, antara lain : merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi menuju terwujudnya *good governance*, sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Guna mengetahui kinerja (*performance*) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama tahun 2014, maka disusunlah Laporan Kinerja BKP Tahun 2014. Indikator sasaran yang ditargetkan sebagian telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) serta Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan. Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 yang telah dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapang, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Februari 2015

Pt. Kepala Badan Ketahanan Pangan



Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, MSc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2014. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), BKP juga ditetapkan secara *ex-officio* sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian. DKP yang dibentuk diarahkan untuk memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2010 – 2014 edisi revisi Juni 2011, Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: ***"menjadi institusi yang handal, inovatif, dan aspiratif dalam pemantapan ketahanan pangan"***. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: (1) Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan; (2) Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional; (3) Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; dan (4) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 sebagai berikut : (1) Penurunan penduduk rawan pangan per tahun sebesar 1 %; (2) Skor PPH Peningkatan Diversifikasai Pangan sebesar 82,5; (3) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun sebesar 1,5 %; dan (4) Lembaga Distribusi dan Lumbung Pangan dalam Pengembangan Stabilisasi Pangan Pokok sebanyak 1.750 Gapoktan, 1.000 Lumbung Pangan, dan 17 Cadangan Pangan Pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, serta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran

dan indikator tersebut, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan satu program yaitu : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Secara umum kegiatan aksi program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dampaknya hanya berhasil pada wilayah/kelompok sasaran, belum berdampak secara nasional.

Berdasarkan capaian indikator kinerja, keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan target adalah : (1) skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 101,09 persen (sangat berhasil); dan (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebesar 114,17 persen (sangat berhasil); serta (3) Pengembangan Lembaga Distribusi dan Stabilisasi Harga yaitu Penguatan LDPM sebesar 93,05 persen (berhasil), Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebesar 100 persen (berhasil). Indikator lainnya yaitu penurunan penduduk rawan pangan, penurunan konsumsi beras, belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2014 adalah : (1) pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjangkau dengan harga yang murah; (6) kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat; (7) terdapatnya konsep makan “belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat; (8) pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Terpaut dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2014, maka dalam upaya peningkatan kinerja Badan Ketahanan Pangan ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan pendekatan antara lain: 1) Membangun dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan; 2) Peningkatan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan melalui sosialisasi, seminar/workshop, advokasi, pemanfaatan multi media yang tersedia, penyebaran bahan informasi berupa *booklet* dan *leaflet* yang praktis tentang ketahanan pangan, dan lainnya; 3) Kemampuan dan kualitas SDM Aparat perlu ditingkatkan, dengan: pendidikan, pelatihan, dan

pengembangan jejaring kerja melalui akses informasi ketahanan pangan khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; 4) Mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan pusat dan daerah melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; 5) Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; 6) Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan yang disusun di pusat.

Dalam mencapai target program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, Badan Ketahanan Pangan perlu dukungan dari instansi lain baik lintas sektor maupun lingkup Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut adalah : (1) peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi; (2) peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan; (3) pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu; (4) pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan; (5) teknologi tepat guna dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; serta (6) penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura.

Jakarta, Februari 2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Startegis.....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	20
C. Realisasi Anggaran.....	50
D. Dukungan Instansi Lain.....	54
BAB IV : PENUTUP.....	55
A. Simpulan Umum.....	55
B. Hambatan, Kendala dan Upaya dan Tindak Lanjut.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel	1.	Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014	15
Tabel	2.	Perubahan Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014	15
Tabel	3.	Keselarasannya Indikator Kinerja Renstra dengan Revisi Penetapan Kinerja.....	17
Tabel	4.	Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014.....	19
Tabel	5.	Angka Rawan Pangan Tahun 2010 – 2014	21
Tabel	6.	Angka Rawan Pangan Tahun 2011 Triwulan I – Tahun 2014 Triwulan I.....	22
Tabel	7.	Perkembangan Jumlah Dana Bansos dan Realisasi Desa/Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2010 - 2014.....	24
Tabel	8.	Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2010 – 2014.....	25
Tabel	9.	Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2010 - 2014.....	27
Tabel	10.	Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Periode 2013-2014.....	32
Tabel	11.	Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Periode 2010-2014.....	32
Tabel	12.	Perbandingan Tingkat Harga dan Flutuasi Harga GKP Tahun 2012 Tingkat Gapoktan LDPM	33
Tabel	13.	Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2009-2014.....	34
Tabel	14.	Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2014.....	34
Tabel	15.	Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2013 - 2014.....	44

Tabel	16.	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2014.....	51
Tabel	17.	Alokasi dan Realisasi Realisasi Anggaran Lingkup BKP TA. 2014 Setelah Penghematan.....	51
Tabel	18.	Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah Per Jenis Belanja pada TA. 2014.....	51
Tabel	19.	Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan 2010 - 2014.....	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1. Kerawanan Pangan Berdasarkan Nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahun 2010-2014.....	21
Grafik	2. Jumlah Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sampai bulan Oktober 2014.....	36
Grafik	3. Data Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Tahun 2014.....	37
Grafik	4. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif per Tahun dan per Kegiatan.	39
Grafik	5. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif pada Kegiatan BKP.....	40
Grafik	6. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per Tahun dan per Kegiatan.	40
Grafik	7. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per Kegiatan 2010 – 2014....	41
Grafik	8. Perbandingan Anggaran Kurang Tertib per Tahun dan per Kegiatan..	41
Grafik	9. Perbandingan Anggaran Kurang Tertib per Kegiatan 2010 – 2014.....	42
Grafik	10. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi per Tahun dan per Kegiatan.....	42
Grafik	11. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi per Kegiatan 2010 – 2014.....	43
Grafik	12. Hasil Pengujian Pangan segar yang TMS dari Residu Pestisida.....	48
Grafik	13. Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Renstra dan Pagu Anggaran Tahunan BKPTahun 2010 – 2014.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan	61
Lampiran 2. Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2010 – 2014 Awal.....	62
Lampiran 3. Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2010 – 2014 Revisi.....	63
Lampiran 4. Perkembangan Konsumsi Per Kelompok Pangan 2009 - 2014.....	64
Lampiran 5. Perkembangan Konsumsi Per Komoditas Tingkat Nasional Tahun 2010 - 2014.....	65
Lampiran 6. Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat Per Provinsi.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai "*kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau*" dan ketahanan pangan merupakan *tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat*. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

(4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2014 adalah : (1) Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) Konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) Teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah; (4) Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) Beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah; (7) Terdapatnya konsep makan "belum makan kalau belum makan nasi" yang salah dalam masyarakat; (8) Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) Bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon I dalam struktur organisasi Kementerian Pertanian, ditetapkan dalam : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Dalam peraturan tersebut tugas Badan Ketahanan Pangan yaitu: "*Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan*". Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, BKP juga secara *ex-officio* bertugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada : (1) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan; (2) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (4) Peraturan Menteri Pertanian nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2013; dan (5) Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP). Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2014, disusunlah Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi Kementerian Pertanian.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk : (1) Mengetahui sejauhmana kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2014; dan (2) Memenuhi kewajiban Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014 dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian.

C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas BKP berdasarkan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan". Dalam melaksanakan tugasnya, BKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
2. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;
3. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;
4. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; serta
5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang berperan dalam pembangunan ketahanan pangan, maka sangat diperlukan kerjasama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat serta koordinasi program dan kegiatan berbagai subsektor dan sektor. Guna mewujudkan sinergi dan harmonisasi kebijakan dan program, serta memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertugas merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), menetapkan BKP secara *ex-officio* sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian.

BKP selaku Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Menteri Pertanian selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Presiden RI untuk : (1) Merumuskan

kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Tugas BKP meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, BKP didukung oleh empat Eselon II dengan struktur organisasi, yaitu:

1. *Sekretariat Badan*, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.
2. *Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan*, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
3. *Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan*, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan.
4. *Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan*, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

Bagan struktur organisasi BKP berdasarkan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 sebagaimana pada **Lampiran 1**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Acuan Rencana strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dalam menyusun LAKIP Badan Ketahanan Pangan adalah Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 edisi revisi pada bulan Juni tahun 2011. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan sesuai surat adendum nomor 321/RC.120/K/06/2013. Perubahan dan penambahan Renstra tersebut sebagai upaya dalam menjawab perubahan arah kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan sebagai berikut :

Mengacu visi, arah, dan kebijakan pembangunan pertanian, maka Visi BKP Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 "*menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan*". *Handal* berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. *Aspiratif* berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. *Inovatif* berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. *Pemantapan Ketahanan Pangan* adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi BKP Kementerian Pertanian dalam tahun 2010-2014 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;

3. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Seiring visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan, potensi, dan peluang, tujuan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2010-2014 adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga, dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita; dan
5. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Badan Ketahanan Pangan, sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 - 2014 ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
2. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
3. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;
4. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein

hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;

5. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
6. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.
7. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
8. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;
3. Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar;
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Implementasi dari Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 tersebut, dilaksanakan melalui :

1. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan;

2. Pemantapan sistem distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan;
3. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
4. Penajaman keamanan pangan segar; dan
5. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi di atas adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, melalui : (a) Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi); (b) Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah; (c) Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (d) Memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan; dan (e) Meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.
2. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui : (a) Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat; (b) Mengembangkan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (penguatan LDPM) di daerah sentra produksi padi dan jagung; dan (c) Memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan serta daya beli masyarakat.
3. Percepatan penganeekaragaman konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui : (a) Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan; (c) Menumbuhkan dan mengembangkan industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu); (d) Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat; dan (e) Pengawasan keamanan pangan segar.

4. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui : (a) Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor; (b) Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat; (c) Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan; (d) Peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; (e) Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan; dan (f) Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk menopang berbagai strategi tersebut, diperlukan strategi penunjang yang tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi BKP, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional, bersih, peduli, transparan, dan bebas KKN.
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan ketahanan pangan.
3. Merumuskan produk hukum bidang ketahanan pangan yg berpihak kepada petani.
4. Membangun sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan yang efektif.
5. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penanganan ketahanan pangan.

Kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang bersifat umum dan strategis tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan BKP, tetapi menyebar di berbagai subsektor lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya. Beberapa kebijakan yang berada dalam kewenangan dan penanganan dari BKP antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, diarahkan untuk: (i) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (ii) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

2. Peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakannya diarahkan untuk : (i) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (ii) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (iv) Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, antara lain: (i) Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; (ii) Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; (iii) Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar; dan (iv) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.
4. Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, antara lain: (i) Mendorong koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (ii) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; (iii) Meningkatkan peranan kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain : (i) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (ii) Peningkatan kerja sama internasional; (iii) Peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (iv) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (v) Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Pada tahun 2010 merupakan tahun peralihan atau awal Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, maka program yang dilaksanakan masih mengacu KIB I tahun 2005 – 2009 yaitu : (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan (3) Penerapan Kepemerintahan yang Baik. Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2014, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mengacu pada program pembangunan tahun 2010-2014 yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Sasaran (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu :

1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.
2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan.
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan administrasi dan manajemen terhadap penyelenggaran ketahanan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan berbagai kegiatan; (b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; dan (c) Pelayanan Publik atau Birokrasi, yang diarahkan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan kerjasama dalam

penyelenggaraan ketahanan pangan. Namun demikian, kegiatan ini tidak dicantumkan dalam laporan ini karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi, sehingga dianggap tidak dapat mewakili kinerja Badan Ketahanan Pangan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta perkembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perubahan data sementara menjadi data tetap, maka perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014. Perubahan tersebut difokuskan pada pergeseran komponen kegiatan cadangan pangan dari kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan ke kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, sebaliknya komponen kegiatan akses pangan berpindah dari kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan ke kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan. Selain itu, perubahan tersebut diarahkan pada penajaman program dan kegiatan ketahanan pangan dalam rangka melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah (maksudnya pemerintah pusat), sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tertanggal 22 Desember 2010.

Perubahan tersebut juga berdampak pada penetapan indikator utama Badan Ketahanan Pangan melalui Surat Adendum nomor 321/Rc.120/K/06/2013 tanggal 1 Juni 2013, yaitu (1) Penurunan penduduk rawan pangan per tahun; (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH); (3) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun; serta (4) Pengembangan lembaga distribusi masyarakat untuk menjaga kestabilan pangan pokok.

Indikator sasaran program (outcome) pada Renstra BKP Awal tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : (1) % Realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan; (2) % Realisasi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam peningkatan konsumsi pangan beragam,

bergizi seimbang; (3) % Realisasi penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat; (4) % Realisasi pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan. Adapun indikator sasaran program (outcome) pada Renstra BKP Revisi tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : (1) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan per tahun; (2) Peningkatan diversifikasi/penganeekaragaman konsumsi pangan dengan pencapaian skor PPH; (3) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun; serta (4) Pengembangan lembaga distribusi masyarakat untuk menjaga kestabilan pangan pokok. Uraian indikator sasaran program Renstra Awal dan Revisi seperti pada **lampiran 2 dan 3**.

Rencana kinerja yang direncanakan pada tahun 2014 merupakan implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja. Sasaran Kinerja Tahun 2014 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, dengan indikator kinerjanya sebagai berikut :

- a. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan per tahun sebesar 1 %;
- b. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 %;
- c. Meningkatnya skor PPH sebesar 93,3;
- d. Stabilitasnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya, sesuai HPP;
- e. Stabilitasnya harga beras di tingkat konsumen, dengan *Coefficient Variant* (CV) < 10 persen.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1. Penurunan penduduk rawan pangan per tahun	1 %
		2. Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan	93,5 %
		3. Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun	1,5 %
		4. Stabilitasnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya	Sesuai HPP
		5. Stabilitasnya harga beras di tingkat konsumen	CV < 10 %

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 526.0184.900.000,00

Dengan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan pada pertengahan tahun 2014, maka indikator kinerja pada Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 mengalami perubahan, seperti pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Perubahan Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1. Penurunan penduduk rawan pangan per tahun	1 %
		2. Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan	82,5
		3. Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun	1,5 %
		4. Pengembangan Lembaga Distribusi dan Stabilisasi Pangan Pokok	a. LDPM = 1.750 Gap b. LPM = 1.000 LP c. CPP = 17 CPP

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp. 458.545.471.000,00.

Perubahan target tersebut pada indikator :

1. Adanya perubahan kebijakan penghematan anggaran untuk subsidi BBM, sehingga terjadi perubahan/refocusing anggaran dan kegiatan.
2. Skor PP Peningkatan Diversifikasi Pangan yang semula dari 93,3 **menjadi** 82,5. Berdasarkan hasil review terhadap capaian skor PPH tahun 2013, maka capaian skor PPH aktual mempunyai gap yang cukup besar dengan skor PPH sasaran tahun 2013 (capaian skor PPH tahun 2013 sebesar 81,4, sedangkan target sasaran adalah 91,5). Mempertimbangkan hal tersebut, dan sesuai dengan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yang merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya (sesuai Perpres 22 tahun 2009), dijadikan sebagai target capaian tahun 2015. Oleh karena itu perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap proyeksi konsumsi pangan dengan baseline data tahun 2013 (skor PPH sebesar 81,4), dari hasil proyeksi tersebut, didapatkan sasaran skor PPH tahun 2014 adalah 82,5.
3. Semula kegiatan distribusi adalah : Stabilitasnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya, dan Stabilitasnya harga beras di tingkat konsumen, **menjadi** Pengembangan Lembaga Distribusi dan Stabilisasi Pangan Pokok. Perubahan tersebut disebabkan adanya perubahan arahan kebijakan bahwa Badan Ketahanan Pangan tidak melaksanakan kegiatan stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen, namun hanya mengolah, dan menyajikan data harga pangan komoditas yang bersumber dari Menko Perekonomian, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Pusat Induk Beras Cipinang.

Revisi PK tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Pertanian bulan Juni 2014. Dengan adanya perubahan tersebut, maka Revisi Penetapan Kinerja sudah selaras dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014, seperti pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 : Keselarasan Indikator Kinerja Renstra dengan Revisi Penetapan Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Revisi PK
1	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1. Penurunan penduduk rawan pangan per tahun	1 %	1 %
		2. Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan	93,3 %	82,5 %
		3. Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun	1,5 %	1,5 %
		4. Pengembangan Lembaga Distribusi dan Stabilisasi Pangan Pokok	a. LDPM = 1.750 Gap b. LPM = 1.000 LP c. CPP = 17 CPP	a. LDPM = 1.750 Gap b. LPM = 1.000 LP c. CPP = 17 CPP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut :

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja > 100%
2. Berhasil : 80-100%
3. Cukup Berhasil : 60-79%
4. Tidak Berhasil : < 60%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2014, sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat BKP, yaitu meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, dengan sasaran kegiatan utama yaitu: (1) Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (2) Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan; (3) Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan; (4) Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan. Masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan dalam menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan unit kerja Eselon II yaitu Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan,

serta Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tersebut dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan triwulanan melalui Laporan Sistem Monitoring Evaluasi (Simonev) dan PMK 249/2011 secara *online*, Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAI), serta Laporan Kegiatan Utama dan Strategis. Mengingat perubahan Penetapan Kinerja dilaksanakan pada bulan Juli 2014, maka pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tersebut dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliabel sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja			
		IK	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1. Penurunan penduduk rawan pangan per tahun	1 %	0,09 %	9 % (tidak berhasil)
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,5	83,4	101,09 % (sangat berhasil)
		3. Penurunan konsumsi beras per tahun	1,5 %	0,1 %	6,67 % (tidak berhasil)
		4. Pengembangan Lembaga Distribusi dan Stabilisasi Pangan Pokok	a. LDPM = 1.750 Gap b. LPM = 1.000 LP c. CPP = 17 CPP	a. LDPM = 1.376 Gap b. LPM = 1.000 LP c. CPP = 24 CPP	Capaian : a. LDPM = 93,05 % (berhasil) b. LPM = 100 % (berhasil) c. CPP = 114,17 % (berhasil)

Sumber data, diolah BKP Kementerian Pertanian.

Keterangan :

1. Jumlah Penduduk Rawan Pangan :Th. 2013 T.I = 83,65 juta (33,85 %), Th. 2014 T.I = 84,82 juta (33,74 %)
2. Konsumsi Beras :Th. 2013 = 96,32 Kg/kap/th, Th. 2014 = 96,20 Kg/kap/th

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui, bahwa capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2014 adalah : (1) Sangat berhasil adalah Skor PPH yaitu 101,09 persen, dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebesar 114,17 persen; (2) Berhasil adalah Pengembangan Lembaga Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok sebesar : 93,05 persen untuk kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), dan kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebesar 100 persen. Sedangkan yang belum berhasil adalah Penurunan Penduduk Rawan Pangan per Tahun, dan Penurunan Konsumsi Beras per Kapita/Tahun.

Apabila dibandingkan capaian kinerja 5 tahun terakhir, bahwa indikator kinerja yang belum berhasil adalah indicator penurunan penduduk rawan pangan per tahun, sedangkan capaian kinerja yang berhasil namun berfluktuatif yaitu Skor PPH dan Penurunan Konsumsi Beras. Sedangkan capaian indicator kinerja yang berhasil yaitu Pengembangan Lembaga Distribusi dan Stabilisasi Pangan Pokok.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran tersebut. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penurunan Penduduk Rawan Pangan

Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan masalah yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan suatu wilayah. Tingkat perkembangan penduduk rawan pangan ditunjukkan dengan Angka Rawan Pangan yang merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Data dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan adalah data hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh

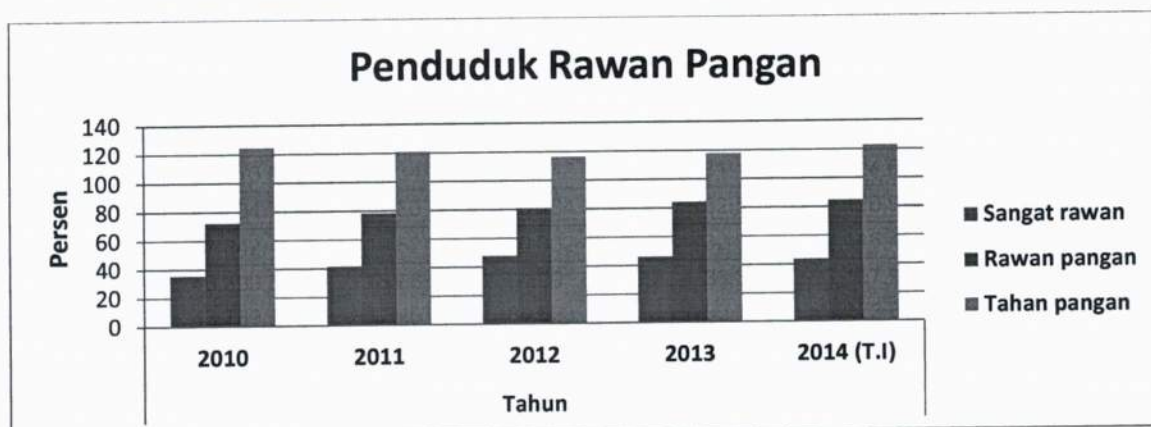
berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) 2004 adalah 2000 kkal. Persentase rawan pangan berdasar angka kecukupan gizi (AKG) suatu daerah, dihitung dengan menjumlahkan penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1400 kkal (70% AKG) perkapita dibagi dengan jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu. Angka rawan pangan sejak tahun 2010–2014 Triwulan I ditunjukkan pada Tabel 5 dan Grafik 1 berikut ini.

Tabel 5. Angka Rawan Pangan Tahun 2010-2014.

Tahun	Jumlah Penduduk Sangat Rawan Pangan (< 70% AKG)	%	Jumlah Penduduk Rawan Pangan (70%-89,9% AKG)	%	Jumlah Penduduk Tahan Pangan (>=90% AKG)	%
2010	35,710,964	15,34	72,442,169	31,12	124,608,211	53,53
2011	41,704,729	17,30	78,434,302	32,53	120,994,688	50,18
2012	47,842,490	19,52	80,832,494	32,97	116,463,438	47,51
2013	46,399,355	18,68	84,091,618	33,85	117,956,185	47,48
2014 TW I	43,739,341	17,40	84,823,188	33,74	122,825,321	48,86

Sumber : BPS RI – Data Susenas
Keterangan : Tahun 2014 pada Triwulan I

Grafik 1. Kerawanan Pangan Berdasarkan Nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahun 2010 – 2014.



Sumber : Data BPS-Susenas

Keterangan:

- Sangat rawan : (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG;
- Rawan Pangan : (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG;
- Tahan pangan : (c) Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG,

Tabel 6. Angka Rawan Pangan Tahun 2011 Triwulan I - 2014 Triwulan I.

Tahun	Jumlah Penduduk Sangat Rawan Pangan (< 70% AKG)	%	Jumlah Penduduk Rawan Pangan (70%-89,9% AKG)	%	Jumlah Penduduk Tahan Pangan (>=90% AKG)	%
2011 TW I	35,217,814	14.65	72,722,413	30.25	132,443,071	55.10
2012 TW I	50,353,088	20.67	79,557,170	32.66	113,665,361	46.67
2013 TW I	47,020,098	19.04	83,651,655	33.87	116,308,063	47.09
2014 TW I	43,739,341	17.40	84,823,188	33.74	122,825,321	48.86

Sumber : Data BPS-Susenas

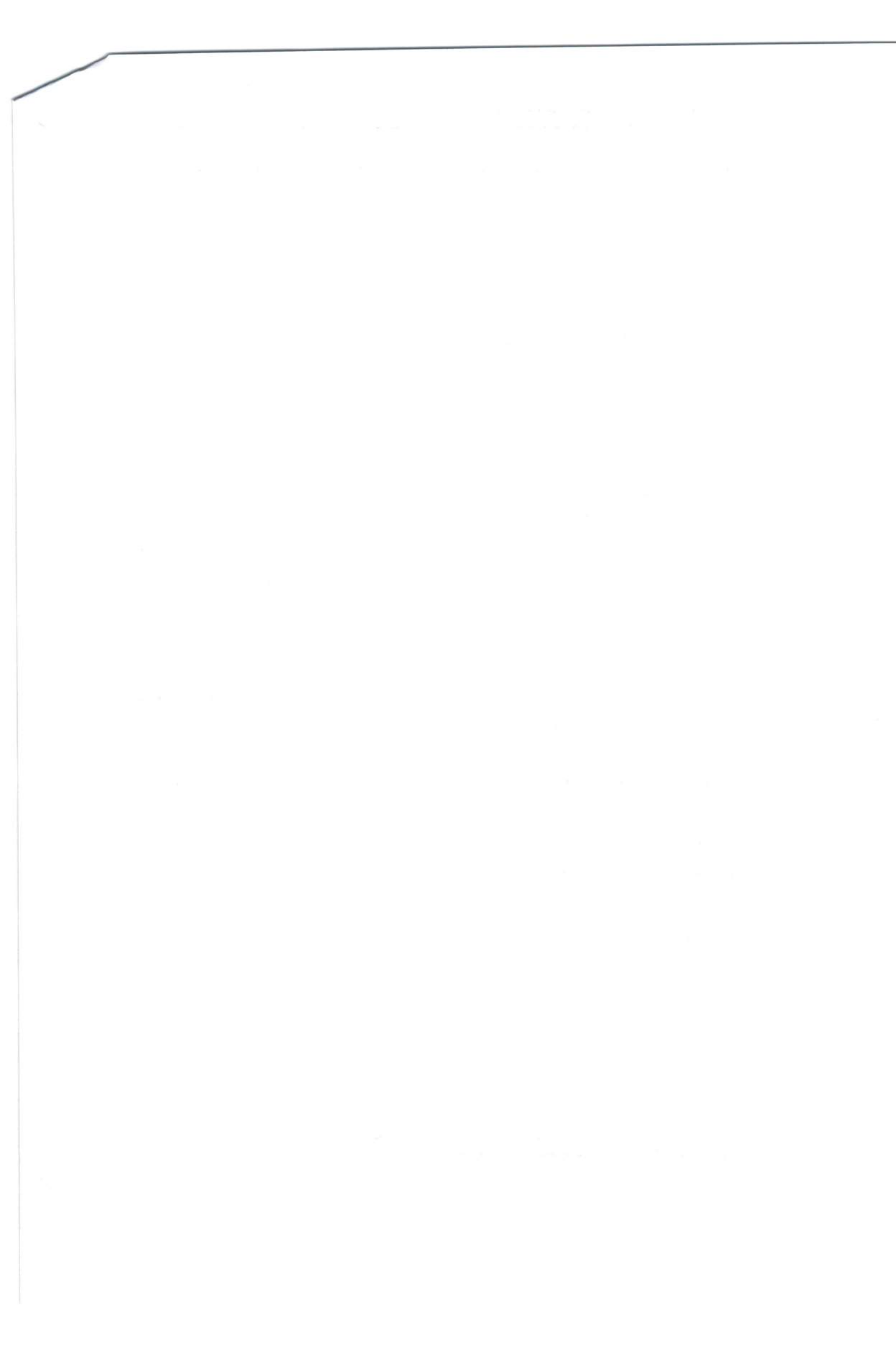
Keterangan:

Sangat rawan : (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG;
 Rawan Pangan : (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG;
 Tahan pangan : (c) Konsumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG,

Berdasarkan perkembangan angka rawan pangan pada tabel dan grafik diatas yang merupakan angka gabungan yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh sampel data susenas pada tahun tersebut, terlihat bahwa penduduk rawan pangan mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2010 - 2014 Triwulan I. Persentase angka sangat rawan pangan pada tahun 2010 sekitar 35,71 juta atau 15,34 persen, pada tahun 2011 bertambah menjadi 41,70 juta atau 17,30 persen, dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 47,82 juta atau 19,52 persen; Pada tahun 2013 turun menjadi 46,39 juta atau 18,68 persen; dan pada tahun 2014 triwulan I turun lagi menjadi 43,73 juta atau 17.40 persen.

Berdasarkan kajian terkait dengan fluktuatifnya jumlah penduduk rawan pangan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk rawan pangan paling tinggi yaitu penduduk yang berada pada kuantil pertama tergolong dalam penduduk relatif miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kelompok penduduk relative miskin, kejadian rawan pangannya lebih tinggi dibandingkan penduduk pada kelompok tidak miskin. Diharapkan kebijakan pemerintah difokuskan pada penduduk kelompok relatif miskin



2. Apabila dilihat dari golongan pengeluaran, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran penduduk, maka angka rawan pangan pada golongan tersebut semakin kecil.
3. Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan pengukuran pendapatan daerah diduga mempunyai pengaruh terhadap kerawanan pangan suatu wilayah. Hasil kajian menunjukkan adanya hubungan antara PDRB dengan angka rawan pangan meskipun hubungan tersebut kecil dan negative, artinya semakin tinggi PDRB maka kerawanan pangan di wilayah tersebut semakin rendah.
4. Karakteristik rumah tangga rawan pangan yang meliputi persentase wanita usia subur yang buta huruf, persentase kepala rumah tangga menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah anggota rumah tangga menyebutkan bahwa: semakin tinggi persentase wanita usia subur yang buta huruf, persentase kepala rumah tangga dengan pendidikan tertinggi tamat SD/ sederajat dan persentase rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga lebih maka persentase rumah tangga rawan pangan menunjukkan jumlah yang lebih besar.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung penurunan rawan pangan adalah kegiatan Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Kegiatan penanganan daerah rawan pangan lebih difokuskan pada pencegahan dini daerah rawan melalui optimalisasi kegiatan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas/Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*) dan SKPG (*Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi*) yang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan informasi tentang kantong-kantong kerawanan pangan tingkat wilayah. FSVA disusun pada tingkat wilayah dengan menggunakan indikator yang sifatnya statis dan perubahannya jangka panjang periode pengambilan data setiap 2-3 tahun. Untuk memperkuat analisis FSVA dilakukan sistem pemantauan dan deteksi dini dalam mengantisipasi kejadian kerawanan pangan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik (bulanan) dan terus menerus. SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan,

analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi *bulanan* dan *tahunan*. Data bulanan dan tahunan tersebut menginformasikan tentang 3 (tiga) indikator utama yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk menginformasikan situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Kegiatan SKPG kurang berjalan sesuai dengan target, karena (i) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisis SKPG; (ii) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; (iii) Tidak optimalnya peran Tim Pokja SKPG; dan (iv) Kurangnya kesadaran aparat terkait pentingnya kegiatan pemantauan pangan dan gizi melalui SKPG.

Dalam rangka pengurangan kemiskinan dan rawan pangan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan BKP adalah Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan. Selain kegiatan pendampingan masyarakat oleh tenaga pendamping, juga dialokasikan dana bansos yang digunakan dalam rangka pengembangan ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2013 disediakan dana bansos Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan sebanyak Rp. 24,200 Miliar dan menurun menjadi Rp. 21,800 Miliar pada tahun 2014. Penurunan tersebut disebabkan pengurangan sasaran Kawasan Mandiri Pangan.

Tabel 7. Perkembangan Dana Bansos dan Realisasi Desa/Kawasan Mandiri Pangan, Tahun 2010–2014.

Tahun	2010	2011	2012	2013*	2014*	Rata-rata/tahun
Bansos (juta)	86.150	126.730	169.630	21.800	20.000	38.826
RTM (KK)	235.625	331.375	369.750	109 Kw	107 Kawasan	75.258

Sumber : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Keterangan : *) Kawasan Mandiri Pangan

Sasaran kegiatan Desa dan Kawasan Mapan adalah rumah tangga miskin di desa rawan pangan. Pada tahun 2013, kegiatan Desa Mandiri Pangan dikembangkan dalam 2 (dua) model, yaitu (1) Kegiatan Desa mapan Reguler yang merupakan kelanjutan pembinaan dari desa yang sudah ada, dan (2) Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 121 kawasan dengan jumlah desa rata-rata 3 desa per kawasan, namun pada pertengahan tahun terjadi penghematan BBM sehingga sasarannya berubah menjadi 109 kawasan atau jumlah rumah

tangga miskin (RTM) sebanyak 6.540 KK. Dengan demikian sampai tahun 2013, jumlah RTM yang sudah diberdayakan melalui kegiatan ini sebanyak 376.290 KK atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 75.258 KK/tahun. Pada tahun 2014, kegiatan Desa Mandiri Pangan tetap dikembangkan dalam 2 (dua) model, yaitu (1) Kegiatan Desa mapan Reguler yang merupakan kelanjutan pembinaan dari desa yang sudah ada, dan (2) Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 109 kawasan dengan jumlah desa rata-rata 3 desa per kawasan. Realisasi pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan tahun tidak mencapai 100 % atau sebesar 98,16 %, karena ada 2 (dua) kawasan yang tidak terbentuk karena tidak sesuai dengan CPCL atau Pedoman Umum Pengembangan Kawasan mandiri Pangan yaitu di kabupaten Rote Ndao yaitu kawasan Rote Barat Daya dan Rote Barat.

Beberapa usaha yang sudah dijalankan adalah pengadaan saprodi, dagang hasil bumi, simpan pinjam, pembuatan produk turunan pertanian, penggemukan ternak dan masih banyak lagi usaha yang bertujuan sebagai sumber pendapatan anggota kelompok. Sumber penghasilan ini dipergunakan sebagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2. Skor Pola Pangan Harapan.

Selama periode 2010 - 2014, perkembangan agregat konsumsi pangan (data susenas, BPS) mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat sampai tahun 2011. Gambaran situasi konsumsi pangan, baik secara kuantitas (energi dan protein) maupun kualitas (skor PPH) ditunjukkan dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH 2010 – 2014.

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2.025	2.048	1.944	1.930	1.949
Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	57,9	59,1	55,9	55,7	56,6
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,7	85,6	83,5	81,4	83,4

Sumber : Susenas 2010 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BK

Konsumsi energi per kapita perhari pada tahun 2010 mengalami penurunan sampai tahun 2014 dari 2.025 kkal/kap/hari menjadi 1.949 kkal/kap/hari. Meskipun demikian, capaian tingkat konsumsi energi pada periode 2010 - 2014 masih dalam batas normal, dengan kisaran di atas 90% AKE (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG VIII tahun 2004 : AKE = 2000 kkal/kap/hari). Sementara itu, konsumsi protein selama kurun waktu 2010 - 2014 dari 57,9 gram/kapita/hari menjadi 56,6 gram/kapita/hari atau sudah melebihi angka kecukupan protein yang direkomendasikan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 52 gram perkapita perhari.

Dari sisi komposisi, keragaman konsumsi energi kelompok pangan masih didominasi kelompok padi-padian dengan proporsi melebihi proporsi ideal 50 persen, dan konsumsi umbi-umbian 2-3 persen belum mencapai proporsi ideal 6 persen. Keragaan Konsumsi Per kelompok Pangan pada Tahun 2009-2014, seperti pada **lampiran 4**.

Berdasarkan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH, tahun 2010 - 2014 secara umum telah terjadi peningkatan dari 85,7 tahun 2010 menjadi 83,4 tahun 2014. Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2014 sebesar 83,4 atau 101.1 % dari target sebesar 82,5. Untuk dapat mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat menuju beragam dan bergizi seimbang masih diperlukan upaya: 1) peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi – KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); 2) peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran & buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan yang dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.

3. Penurunan Konsumsi Beras.

Konsumsi beras langsung dalam rumah tangga tahun 2014 sebesar 96,2 kg/kapita dibanding tahun 2013 sebesar 96,3 kg/kapita, terjadi penurunan sebesar 0,1 kg/kapita/tahun atau 0,1% dari target penurunan sebesar 1,5% per tahun. Berdasarkan rekomendasi WNPG X, terjadi peningkatan Angka Kecukupan Energi (AKE) rata – rata penduduk Indonesia, AKE rata-rata sebelumnya adalah 2000 kkal/kap/hari menjadi 2150 kkal/kap/hari, hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur penduduk Indonesia ke arah yang lebih tua, sehingga menyebabkan kebutuhan rata-rata kalori penduduk juga meningkat. Mempertimbangkan hal tersebut, maka beras sebagai penyumbang terbesar dari kebutuhan energi (46,5%) cenderung tetap untuk menutupi peningkatan kebutuhan energi, sehingga penurunan konsumsi beras dari tahun 2014 cukup kecil yaitu dari 96,3 Kg/kap/hari menjadi 96,2 Kg/kap/hari atau sebesar 0,1 %. Namun demikian, secara umum laju rata-rata penurunan konsumsi beras ditingkat rumah tangga selama tahun 2009–2014 sebesar 1,2 persen per tahun, yaitu mengalami penurunan dari 102,2 kg/kap/tahun pada tahun 2009 menjadi 96,2 kg/kap/tahun pada tahun 2014 seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2010 – 2014

Tahun	Konsumsi (Kg/Kap/Thn)	Target (%)	Realisasi (%)
2009	102,2	-	-
2010	97,7	1,5	2,5
2011	101,7	1,5	-2,0
2012	96,6	1,5	5,0
2013	96,3	1,5	0,3
2014	96,2	1,5	0,1
Rata-rata	98,08		1,2

Sumber : Susenas 2009 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP

Secara kuantitas perkembangan konsumsi per komoditas di tingkat nasional selama tahun 2010 - 2014 dapat dilihat **lampiran 5**.

Untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik, maka konsumsi pangan masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Meskipun

tren konsumsi beras mengalami penurunan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi pangan penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

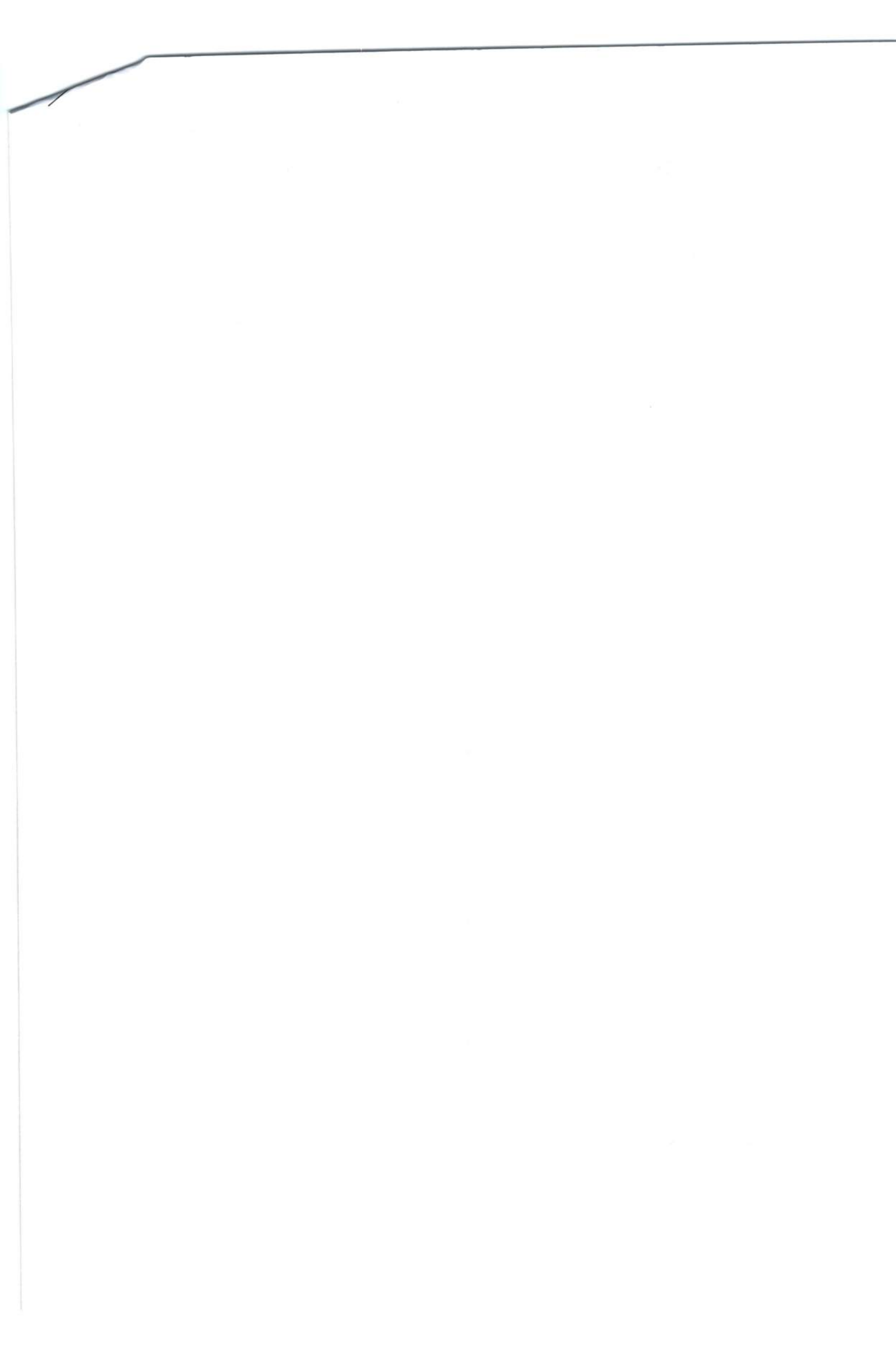
Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat, ditunjukkan dari konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian yang masih rendah (belum memenuhi kebutuhan). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: masih rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang, masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan, kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu, belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga, serta lemahnya partisipasi masyarakat

Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan, antara lain : (a) produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian dipasar; (b) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi (*scaling up production*), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (c) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat; dan (d) berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.

Penurunan konsumsi beras merupakan kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan telah mengalokasikan kegiatan berupa: (a) Pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (b) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang mendukung pangkin (penyediaan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah) dan pengembangan teknologi pangolahan pangan lokal; (c) Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sejak usia dini pada SD/MI; dan (d) Sosialisasi dan Promosi ke masyarakat umum.

Kedepan penurunan konsumsi beras perlu introduksi komponen kegiatan di dalam dan luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian, buah dan sayur. Upaya selanjutnya untuk meningkatkan penurunan konsumsi beras di masyarakat diperlukan ketersediaan produk pangan pokok lokal seperti umbi-umbian yang memadai, dan pengelolaan distribusi yang baik, sehingga harga di pasar dapat ditekan. Untuk itu, diperlukan pengembangan usaha pengolahan pangan pokok lokal lainnya dengan nilai keekonomian yang memadai. Selain itu, kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, terutama karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai kemampuan kerja sama usaha kelompok.

Dalam mewujudkan pemenuhan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus dapat menurunkan konsumsi beras, Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam bentuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta Sosialisasi dan Promosi P2KP. Diperlukan replikasi kegiatan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan keberagaman pangan juga diperlukan dukungan sosialisasi/promosi tentang pentingnya penganekaragaman pangan.



4. Pengembangan Lembaga Distribusi dan Stabilisasi Pangan Pokok

Dalam mendukung stabilisasi harga tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan Penguatan LDPM dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani/kelompoktani/Gapoktan padi dan jagung terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan di saat paceklik. Melalui kegiatan Penguatan-LDPM yang dilaksanakan sejak tahun 2009, pemerintah menyalurkan dana Bantuan Sosial dari APBN kepada Gapoktan untuk memberdayakan kelembagaan Gapoktan agar mampu mendistribusikan hasil produksi pangan dari anggotanya sehingga harga yang diterima di tingkat petani maupun di wilayah stabil, serta menyediakan cadangan pangan dalam rangka penyediaan aksesibilitas pangan bagi anggotanya. Melalui penguatan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik.

Dukungan dana Bansos yang bersumber dari APBN pada kegiatan Penguatan-LDPM hanya diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan tahun kedua. Sementara itu pada tahun ketiga, Gapoktan hanya menerima pembinaan dan/atau bimbingan dari pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi.

Sasaran Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahap Penumbuhan Tahun 2014 sebanyak 1.265 gapoktan tetapi gapoktan yang sudah melaksanakan sebanyak 1.248 gapoktan atau sebesar 98.66 %.

Tahun 2014, target awal sebanyak 182 terdiri dari 75 tahap penumbuhan dan 117 tahap pengembangan setelah ada kebijakan penghematan, sasaran berubah yaitu ditumbuhkan sebanyak 155 Gapoktan terdiri dari: 38 Gapoktan tahap Penumbuhan, dan 117 Gapoktan yang masuk ke tahap Pengembangan. Gapoktan yang masuk pada Tahap Penumbuhan akan menerima dana bansos sebesar Rp 150 juta, tahap Pengembangan akan menerima dana bansos sebesar Rp 75 juta, dan tahap Kemandirian dan Pasca Kemandirian tidak lagi menerima dana bansos namun provinsi dan kabupaten/kota tetap melakukan pembinaan agar dana bansos yang diterima pada tahun pertama dan kedua tetap dikelola dengan baik oleh Gapoktan sebagai modal usaha yang berkembang secara berkelanjutan. Pada akhir tahun 2014 dari 300 Gapoktan setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan, hanya 37 Gapoktan yang layak masuk tahap Penumbuhan dan dapat menerima bansos sebesar Rp. 150 juta/gapoktan; sedangkan 78 Gapoktan yang layak untuk masuk tahap Pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta, dan selanjutnya dana bansos yang tidak dimanfaatkan dikembalikan ke kantor Kas Negara.

Tabel 10. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Tahun 2013 – 2014.

Tahapan	Tahun 2013				Tahun 2014			
	Target Awal	Target P'hematan	Real.	%	Target Awal	Target P'hematan	Real.	%
Penumbuhan	75	75	74	98,66	75	38	37	98,66
Pengembangan	281	225	219	97,33	117	117	78	66,67
Total	358	330	290		292	255	115	45,10

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Keberhasilan yang telah dicapai pada periode 2010 – 2014 pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM seperti diilustrasikan pada tabel berikut ini :

Tabel11. Perkembangan Sasaran Penguatan-LDPM periode 2010 – 2014.

Tahapan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total
Penumbuhan	204	235	281	75	75	833
Pengembangan	545	237	235	281	117	1415
Kemandirian		512	220	235	225	1192
Pasca Kemandirian			512	220	235	967
Total	749	984	1248	811	615	

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Keterangan :

Badan Ketahanan Pangan tidak lagi mendukung pendanaan APBN untuk pembinaan tahap Pasca Kemandirian, selanjutnya dibina oleh provinsi dan kabupaten/kota melalui APBD

Berdasarkan Kajian Evaluasi Dampak Penguatan LDPM Tahun 2013 dapat disimpulkan jika dukungan pemerintah dalam bentuk Bansos Penguatan-LDPM terbukti dapat menjaga stabilitas harga pangan ditingkat petani sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 12**. Harga GKP pada Gapoktan pelaksana Penguatan-LDPM juga relatif lebih stabil dibandingkan dengan harga GKP petani pada umumnya yang ditunjukkan dari nilai CV yang jauh lebih rendah dari nilai CV harga GKP petani umumnya.

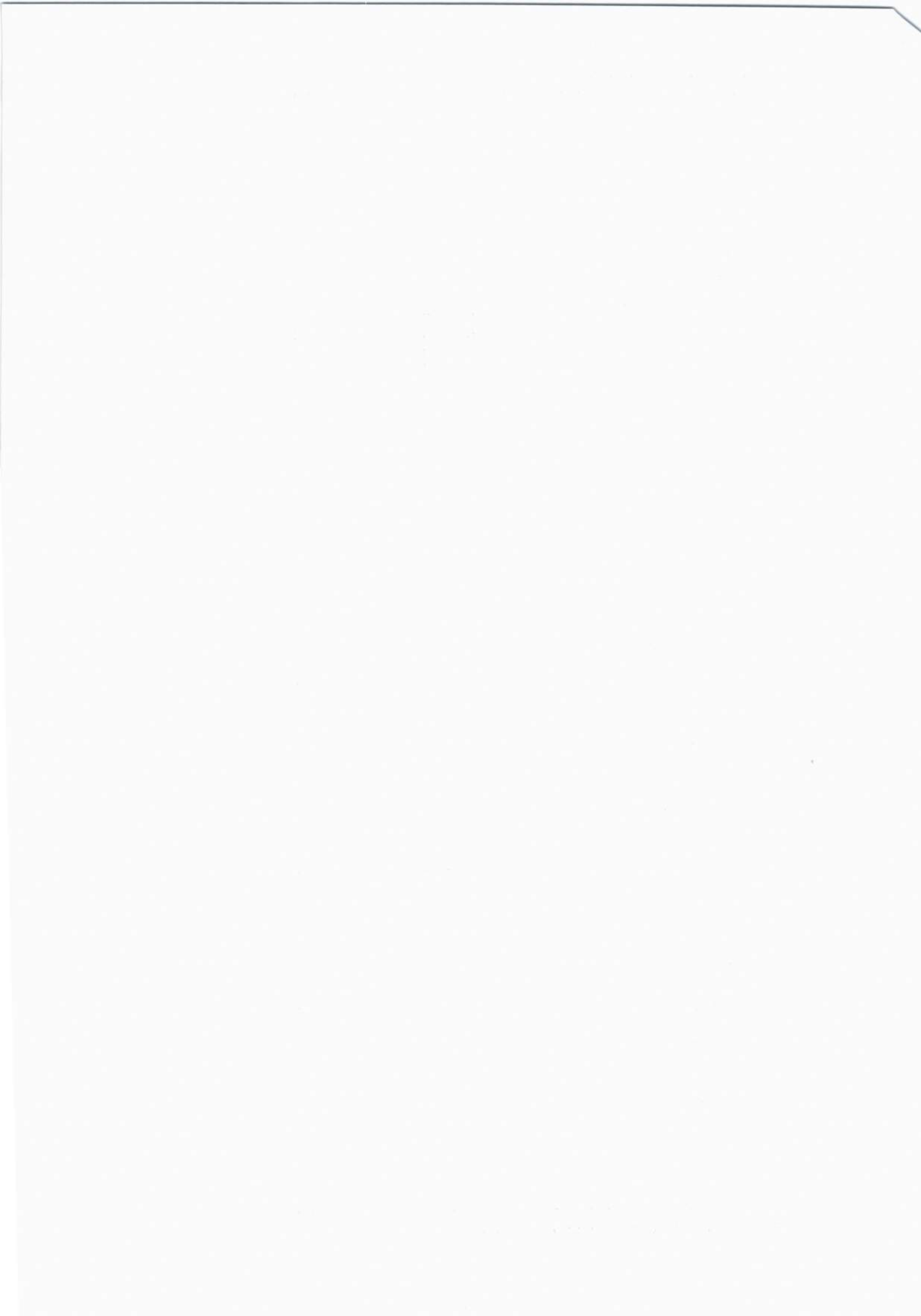
Tabel 12. Perbandingan Tingkat Harga dan Fluktuasi Harga GKP Tahun 2012 Tingkat Gapoktan LDPM.

Uraian	Harga Rata-Rata (Rp/Kg)	CV (%)
GKP Gapoktan LDPM	3695,50	3,00
GKP Petani	3371,83	7,76

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Ket.: HPP GKP tahun 2012 adalah Rp 3,300,- di tingkat petani (Berdasarkan Inpres No 3/2012)

Dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang meningkatkan kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi kelangkaan pangan. Berpengaruh positif dalam membangun perspektif anggota Gapoktan dalam pengembangan agribisnis. Keberadaan saldo akhir ini merupakan indikator utama bahwa Gapoktan peserta Penguatan



LDPM sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Dapat memberikan pekerjaan kepada ibu-ibu rumah tangga dan laki-laki. Dari kegiatan yang diinisiasi Badan Ketahanan Pangan melalui penguatan – LDPM, ternyata tidak hanya mampu melindungi dan memberdayakan petani, tetapi para petani dan Gapoktan telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar Gapoktan juga telah memperoleh dampak ikutan, berupa mata pencaharian. Semua ini, tentu berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

b. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat yang di biayai melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui DAK Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok. Alokasi bansos tahap pengembangan sebesar 20 juta untuk pengisian cadangan pangan dan tahap kemandirian sebesar 20 juta untuk pengembangan usaha.

Pada tahun 2014, untuk Tahap Penumbuhan melalui DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 telah dibangun lumbung pangan sebanyak 887 unit. Sedangkan untuk Tahap Pengembangan dilaksanakan di 13 provinsi sebanyak 94 kelompok dan tahap kemandirian dilaksanakan di 22 provinsi 233 kelompok, sehingga total mencapai 327 kelompok. Pada awalnya, target sasaran kegiatan ini sebanyak 652 kelompok, namun pada pertengahan tahun terjadi penghematan anggaran sehingga terjadi perubahan sasaran menjadi 327 kelompok. Sampai dengan akhir Desember 2014, dana bansos kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sebesar 6.54 milyar telah terealisasi keseluruhan (100%) kepada 327 kelompok lumbung pangan, yang terdiri dari Tahap

Pengembangan sebesar Rp 1,88milyar (94 kelompok) dan Tahap Kemandirian 4,66 milyar (233 kelompok).

Alokasi sasaran fisik kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada **Tabel 13** dibawah ini.

Tabel 13. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2009 – 2014

Tahapan	TAHUN (Jumlah Kelompok)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Penumbuhan	276	690	681	9	838	887
Pengembangan		275	425	620	247	94
Kemandirian			275	408	607	233

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Tabel 14. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2014.

Tahapan	Target Awal	Target Penghematan	Realisasi	Persen
Pengembangan	245	94	100	100
Kemandirian	407	233	100	100
Total	652	327	100	100

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Sementara itu, target dan realisasi kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat per provinsi tahun 2014 dapat dilihat pada **lampiran 6**. Realisasi kegiatan pengembangan lumbung pangan yang mencapai 100 persen. Pencairan dana Bansos kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dari sasaran sebesar Rp. 6,54 milyar untuk 327 kelompok, telah terealisasi sebesar Rp6,54 milyar atau 327 kelompok (100 %) yang terdiri dari Tahap Pengembangan sebesar Rp. 1,88 milyar atau 94 kelompok (100 %), dan Tahap Kemandirian sebesar Rp. 4,66 milyar atau 233 kelompok (100 %).

Hasil pemantauan dan pelaporan dari provinsi sampai dengan Desember 2014 dari 32 provinsi pelaksana kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, dari laporan kondisi cadangan pangan di kelompok lumbung pangan masyarakat yang disampaikan oleh provinsi dapat diketahui bahwa stok awal dan pengadaan pada bulan September sebesar 8.831.524 kg gabah, beras sebesar 2.606.459 kg dan pangan pokok lainnya (jagung atau sagu) sebesar 85.307 kg. Dari pengadaan gabah sebanyak 8.831.524 kg GKG dan telah disalurkan kepada anggotanya sebanyak 2.245.195kg GKG sehingga masih ada total stock gabah di gudang kelompok sebesar 6.580.881 kg GKG. Sedangkan untuk beras dari pengadaan sebanyak 2.606.459 kg telah disalurkan kepada anggota sebanyak 852.478 kg, sisa total stock beras yang ada di gudang kelompok adalah 1.753.981 kg. Sementara itu untuk bahan pangan pokok lainnya pengadaannya sebanyak 85.307 kg dan disalurkan ke anggota sebesar 27.760 kg sehingga total sisa yang ada lumbung kelompok saat ini adalah 57.547 kg.

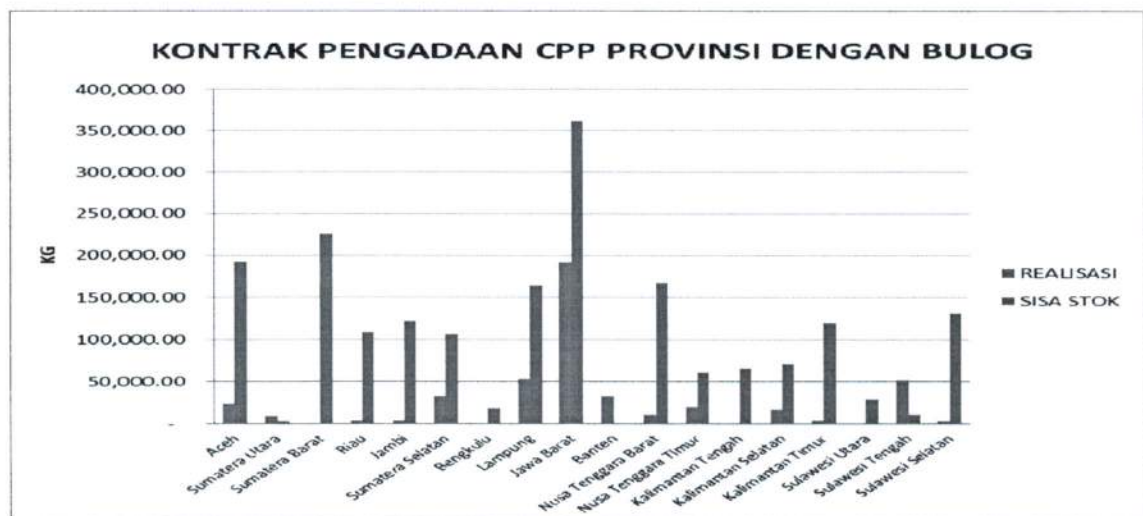
c. Cadangan Pangan Pemerintah

Pada Tahun 2014, Provinsi yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 24 CPP di tingkat provinsi, dan sudah melebihi target dari Penetapan Kinerja yaitu sebanyak 17 CPP atau 141,17 % dengan kategori sangat berhasil.

Pelaksanaan pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi melakukan kontrak dengan Perum BULOG. Proses kontrak dan penyaluran beras Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi, yaitu BKP provinsi mengajukan surat pembelian beras kepada Divre/Subdivre, kemudian dilakukan pembuatan Kontrak Jual Beli (KJB) antara Kepala BKP provinsi dengan Kadivire, Pembuatan Berita Acara Penitipan Beras di gudang Perum BULOG, selanjutnya Divre/Subdivre menerbitkan Surat Alokasi/Laklog, dikeluarkan dari gudang yang ditunjuk melalui SPPB/DO sesuai permintaan BKP. Kontrak Provinsi dilakukan oleh Kepala BKP di tingkat Provinsi dengan Kadivire Perum BULOG, sedangkan kontrak Kabupaten/Kota

dilaksanakan oleh Kepala BKP di tingkat Kab/Kota dengan Kasubdivre Perum BULOG.

Kontrak Badan Ketahanan Pangan di tingkat daerah telah dilakukan sejak tahun 2010 di 11 provinsi. Setiap termin kontrak tidak habis dalam waktu satu tahun, terdapat sisa kontrak di akhir tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat sisa stok sebesar 1,958 juta Ton cadangan beras pemerintah provinsi yang disimpan di Perum BULOG. Realisasi dan sisa stok dapat dilihat pada Gambar 2.



Grafik 2. Jumlah Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sampai Bulan Oktober 2014 (Sumber.Perum BULOG)

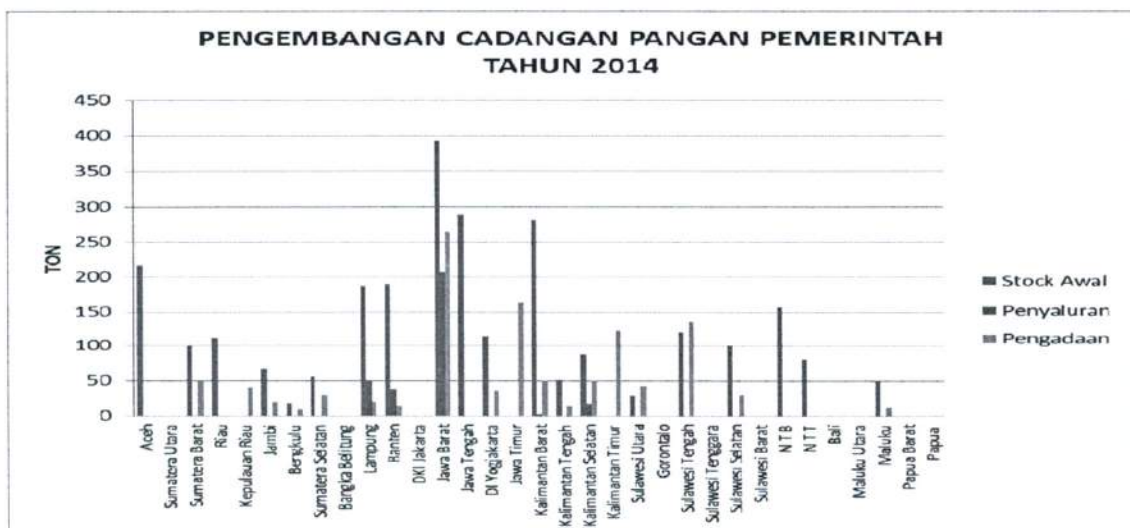
Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran beras untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi adalah pada realisasi penyaluran kontrak beras BKP di daerah umumnya melewati tahun kontrak. Hal ini akan memberikan tambahan beban pemeliharaan beras kepada Bulog, kemudian terjadinya perubahan HPB pada tahun berjalan, sehingga perlu penyesuaian harga atau pemotongan kuantum. Sehingga diperoleh solusi yang disarankan oleh Perum BULOG bahwa BKP sebaiknya melakukan kontrak beras sesuai dengan perkiraan kebutuhan tahun berjalan, dan perlu didukung dengan addendum terhadap harga melalui cadangan APBD setempat atau dengan pemotongan kuantum yang dimiliki BKP Provinsi.

Selain kerjasama dengan BULOG, beberapa provinsi mengelola sendiri karena sudah memiliki UPT Cadangan Pangan. Contoh, (1) Provinsi Jawa

Tengah, dikarenakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai UPT Balai Pengembangan Cadangan Pangan yang terletak di Magelang, UPT tersebut mempunyai gudang untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah; (2) Provinsi DI Yogyakarta, cadangan pangan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dititipkan pada Pusat KUD Metaram DIY yang lokasi penyimpanan bertempat di Godean; (3) Provinsi Kalimantan Barat menitipkan cadangan pangan pemeritan provinsi sebanyak 100 Ton kepada pihak swasta dalam hal ini CV. Sama Bangun Utama; (4) Provinsi Banten selain bekerjasama dengan Perum BULOG Divre DKI Jakarta – Banten dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, juga melakukan penitipan beras kepada LDPM dan Gapoktan (10 kelompok) melalui Nota Kesepakatan bersama antara BKPD Provinsi Banten dengan Gapoktan dan LDPM.

Beberapa provinsi yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah, karena sudah habis disalurkan untuk kondisi dan kebutuhan penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan sosial, dan pengembangan usaha.

Secara rinci perkembangan cadangan pangan pemerintah provinsi Tahun 2014 mulai dari stok awal, penyaluran dan pengadaan dan dapat dilihat pada Grafik 3.



Grafik 3. Data Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Tahun 2014

Kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati adalah sebanyak 96 Kabupaten/kota. Dari 96 kabupaten/kota tersebut terdapat 14 kabupaten/kota yang tidak membangun gudang cadangan pangan pemerintah tetapi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 45 kabupaten/kota menjadi 96 Kabupaten/kota. Hal ini mengingat pentingnya Peraturan Bupati sebagai dasar dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah.

Implementasi dari Peraturan Bupati untuk pengelolaan gudang sebanyak 55 persen dari 96 Kabupaten/kota sudah mempunyai Surat Keputusan Penunjukkan Kepala Gudang. Kepala gudang dapat menugaskan PNS atau tenaga honorer yang mempunyai kemampuan dalam mengelola gudang.

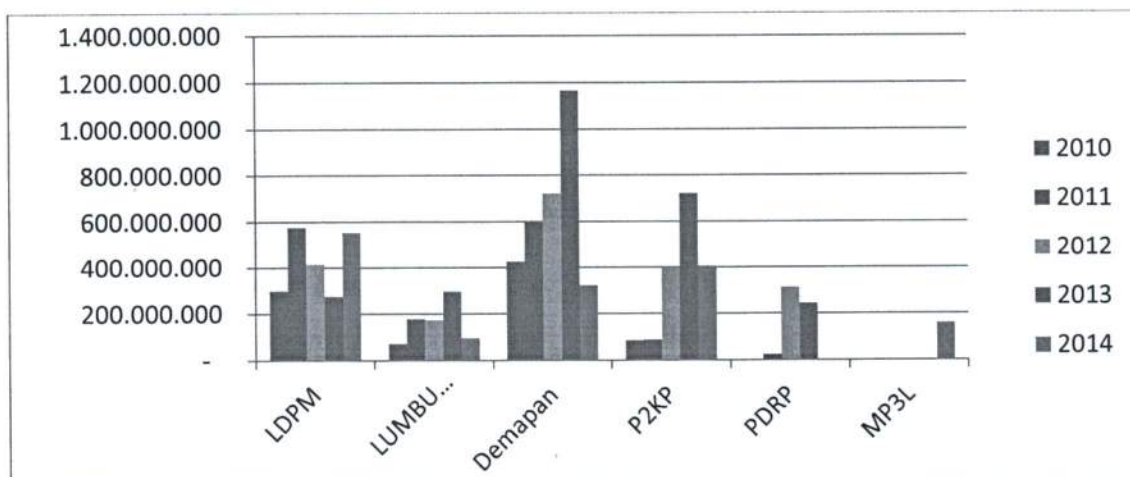
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Kegiatan Prioritas.

Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tidak lepas dari efisiensi penggunaan sumberdaya, baik sumberdaya keuangan maupun pegawai. Penilaian capaian kinerja atas keuangan tidak hanya dari aspek realisasi keuangan tetapi juga hasil pemeriksaan dari auditor baik dari Inspektorat Jenderal maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dilakukan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Beberapa hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 – 2014 yaitu :

- a. Kegiatan tidak/kurang efektif yaitu fakta dari hasil membandingkan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan TOR dan dokumen lainnya dengan hasil yang dicapai menunjukkan adanya ketidak/kekurang efektivitasan;
- b. Kegiatan tidak/kurang efisien yaitu fakta dari hasil membandingkan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan TOR dan dokumen lainnya dengan hasil yang dicapai menunjukkan adanya ketidak/kekurang efisienan;
- c. Tidak tertib yaitu adanya kekurangtaatan dan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Kerugian Negara yaitu terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Grafik 4. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif per tahun dan per kegiatan.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 4 di atas untuk masing-masing kegiatan Badan Ketahanan Pangan dari tahun 2010 - 2013 menunjukkan kenaikan anggaran kurang efektif, namun pada tahun 2014 sudah berkurang signifikan. Anggaran yang kurang efektif sangat tinggi pada kegiatan Demapan tahun 2013.

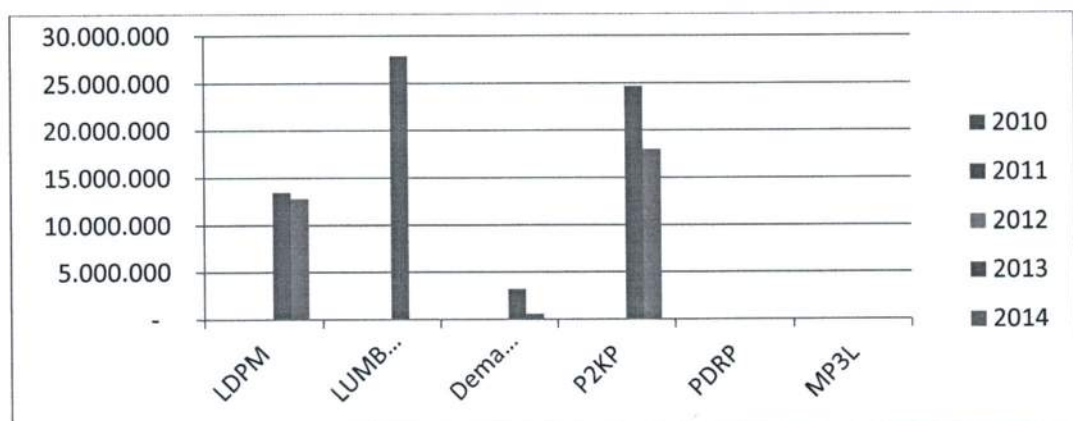
Grafik 5. Perbandingan Anggaran Tidak Efektif pada Kegiatan Badan Ketahanan Pangan.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Dari grafik 5 di atas dapat dilihat dari tahun 2010 – 2014 kegiatan yang paling tinggi nilai tidak efektif yaitu pada kegiatan Demapan dan LDPM.

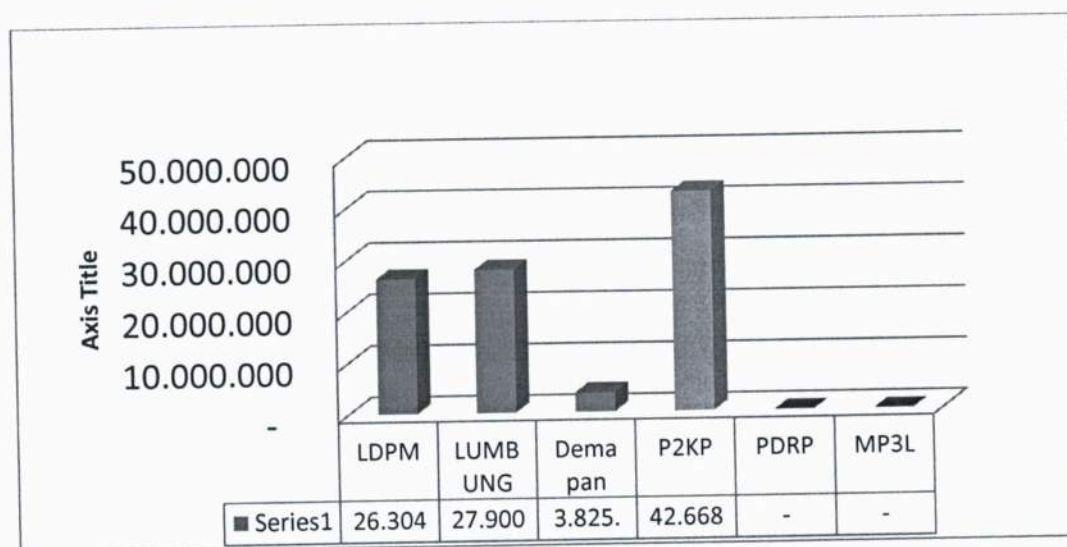
Grafik 6. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per tahun dan per kegiatan.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 6 diatas menunjukkan bahwa untuk kegiatan LDPM, pemanfaatan anggaran kurang efisien terjadi di tahun 2013 dan 2014, untuk Lumbung terjadi di tahun 2013, untuk Demapan terjadi di tahun 2013 dan 2014, untuk P2KP pada tahun 2013 dan 2014. Dua kegiatan yaitu PDRP dan MP3L tidak terdapat anggaran kurang efisien.

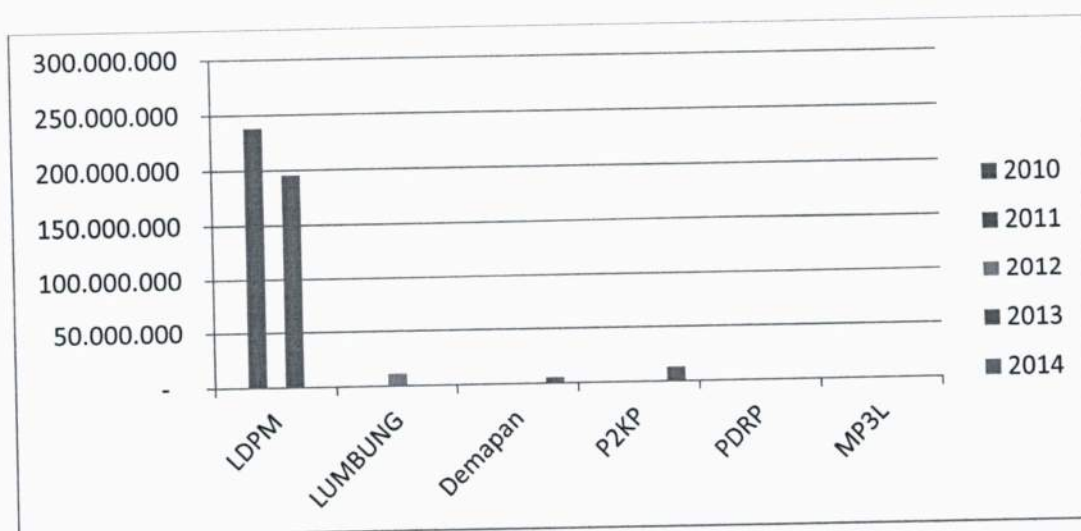
Grafik 7. Perbandingan anggaran kurang efisien per kegiatan tahun 2010 – 2014.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 7 di atas menunjukkan jumlah anggaran tidak efisien pada kegiatan LDPM dan Lumbung hampir sama sedangkan untuk P2KP tinggi dan Demapan dan PDRP dan MP3L kecil.

Grafik 8. Perbandingan Anggaran tidak tertib per tahun dan per kegiatan.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 8 di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran kurang tertib yaitu pada tahun 2011 dan 2013 pada kegiatan LDPM sangat tinggi sedangkan untuk Lumbung, Demapan, P2KP hanya ada di tahun 2012 dan 2014. Sedangkan untuk PDRP dan MP3L tidak terdapat anggaran kurang tertib.

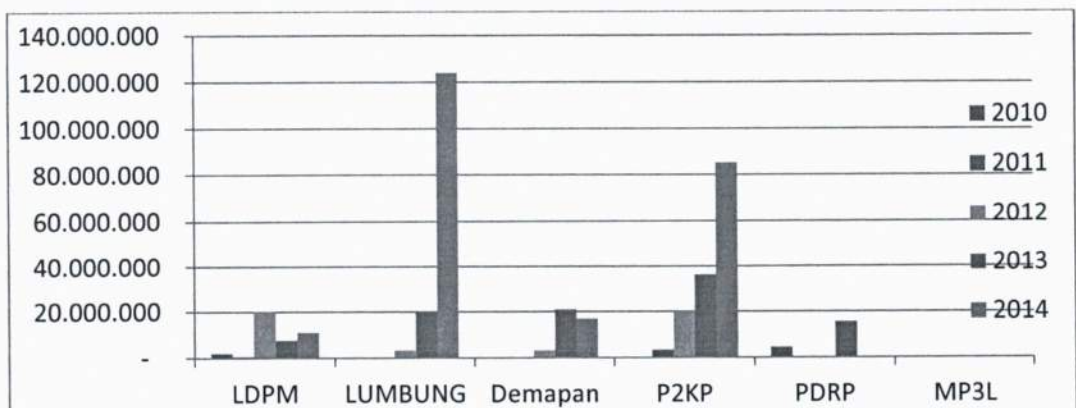
Grafik 9. Perbandingan anggaran kurang tertib per kegiatan tahun 2010 – 2014.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 9 di atas menunjukkan bila dibandingkan dengan per kegiatan anggaran kurang tertib yang paling tinggi ada pada kegiatan LDPM.

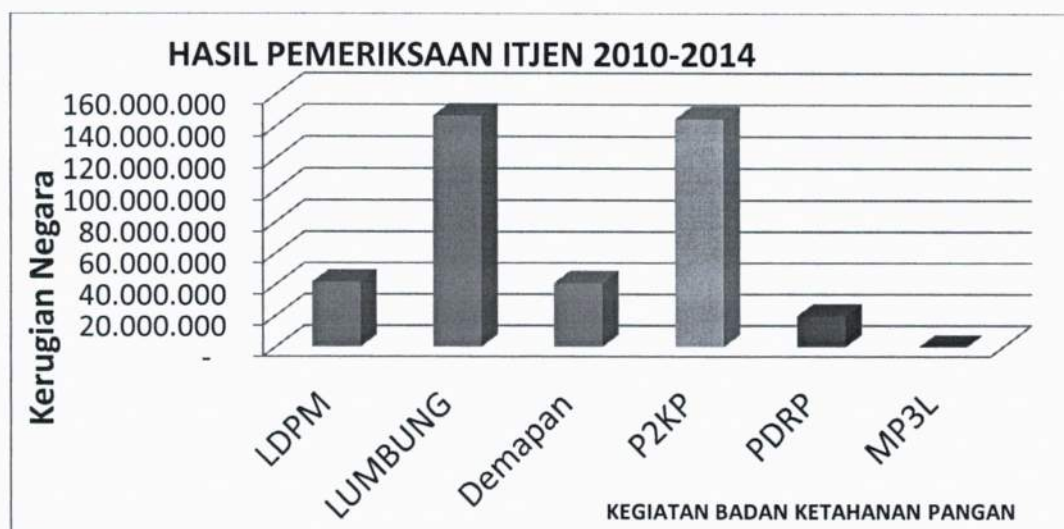
Grafik 10. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tahun dan per kegiatan.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 10 di atas menunjukkan bahwa Tuntutan Ganti Rugi pada kegiatan Lumbung dan P2KP pada tahun 2014 cukup tinggi.

Grafik 11. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per kegiatan tahun 2010 –2014.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 11 di atas menunjukkan bahwa jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kegiatan bahwa TGR untuk kegiatan Lumbung dan P2KP paling tinggi dibanding kegiatan lainnya.

Sedangkan efisiensi penggunaan sumberdaya manusia/pegawai Badan Ketahanan Pangan, merupakan dukungan yang tidak kalah penting dalam pencapaian target program dan kegiatan Badan ketahanan Pangan Tahun 2014. Sumberdaya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Sekretariat DKP. Pada tahun 2014, BKP Kementerian Pertanian didukung oleh 298 pegawai, dengan komposisi yang beragam adalah :

1. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 99 orang atau 33 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 8 orang atau 2,67 persen, Strata Satu 116 orang atau 39 persen, strata dua 69 orang atau 22,67 persen, dan strata tiga 6 orang atau 2 persen.
2. Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,33 persen, golongan II sebanyak 27 orang atau 9 persen, golongan III sebanyak 242 orang atau 81 persen, dan golongan IV sebanyak 30 orang atau 9,67 persen.

3. Usia pegawai: 26-35 tahun sebanyak 73 orang atau 24,67 persen, 36-45 tahun 89 orang atau 29,67 persen, 46-50 tahun 30 orang atau 10 persen, dan lebih dari 51 tahun 107 orang atau 35,67 persen.

Jumlah pegawai BKP Kementerian Pertanian selama tahun 2014, berkurang 4 orang atau 1,33 persen, karena pensiun dan pindah kerja. Kualifikasi pegawai BKP Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun 2013-2014 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 15. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Tahun 2013–2014.

Uraian Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	
	2013	2014
1. Tingkat Pendidikan	304	300
a. SLTA ke bawah	103	99
b. Sarjana Muda dan D-3	10	8
c. Sarjana Strata-1 dan D4	119	116
d. Strata-2 Magister	65	69
e. Strata-3 Doktor	7	6
2. Kepangkatan	304	300
a. Golongan I	2	1
b. Golongan II	33	27
c. Golongan III	241	242
d. Golongan IV	28	30
3. Usia Pegawai	304	300
a. Kurang dari 26 tahun	0	1
b. 26 – 35 tahun	96	73
c. 36 – 45 tahun	78	89
d. 46 – 50 tahun	47	30
e. Lebih dari 51 tahun	83	107

Sumber : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Dalam rangka penilaian indikator kinerja individu/pegawai, telah dilaksanakan Penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS (DP3) kepada seluruh pegawai Badan Ketahanan Pangan. Dalam Penilaian Prestasi sudah terlihat kinerja pegawai dengan nilai 91-100 (A = Sangat Baik) sebanyak 35 pegawai; 76-90 (B = Baik) sebanyak 264 pegawai; 61-75 (C = Cukup) sebanyak 1 pegawai; 51-60 (D = Kurang) sebanyak 0 pegawai; dan < 50 (E = Buruk) sebanyak 0 pegawai.

Apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penilaian capaian kinerja pegawai dengan tahun 2014, terdapat perbedaan penilaian capaian kinerja,

yaitu tahun 2010 – 2013 masih menggunakan sistem DP3 yang menekankan pada perilaku pegawai, sedangkan pada tahun 2014 sudah menggunakan sistem SKP yang menekankan output pekerjaan pegawai dan kehadiran pegawai.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, pada tahun 2014 telah dilakukan: (a) program tugas belajar dan ijin belajar dengan biaya dari pemerintah, maupun biaya sendiri, kursus/pelatihan teknis aplikatif dan administratif, serta workshop/seminar; (b) pembinaan motivasi dan disiplin; (c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; (d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya; (e) sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai BKP; dan rencana perubahan jabatan fungsional pegawai termasuk rencana penyusunan jabatan fungsional khusus/tertentu yaitu analisis ketahanan pangan.

6. Capaian Kinerja Lainnya.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan tugas secara insidental/diluar rencana berdasarkan perintah pimpinan serta kebijakan lainnya yang dianggap penting. Kegiatan tersebut lebih banyak bersifat koordinasi atau dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan intansi terkait baik di dalam maupun luar Kementerian Pertanian; serta di tingkat Internasional yang dikoordinasikan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *United Nations World Food Programme (WFP)*, maupun forum lainnya. Selama 5 tahun, beberapa prestasi Badan Ketahanan Pangan, serta apresiasi dari masyarakat, pemerintah daerah, dan tingkat internasional kepada Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah, seperti :

1. Penyelesaian Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Pada tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan memperoleh penghargaan internasional dari *The Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)* dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, dan disertai pemberian hadiah uang untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar USD 100.000,-

3. Sejak tahun 2011 hingga sekarang, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dengan memakai frasa “*One Day No Rice*” ditingkat nasional bergema keseluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan menerapkan *one day no rice* atau istilah dan kegiatan yang terkait dengan upaya perubahan pemanfaatan substitusi pangan dari umbi-umbian.
4. Meningkatnya kesadaran pentingnya aspek ketahanan pangan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dari lembaga legislatif di provinsi dan kabupaten/kota. Sejak tahun 2010 - 2014 hampir setiap bulan Badan Ketahanan Pangan mendapatkan kunjungan dari DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang ingin mendiskusikan ketahanan pangan, khususnya tentang kebijakan, program dan kegiatan, dan kelembagaan.
5. Pada tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan *Asean Plus Three Emergency Rice Reservel (AFTERR)* berupa hibah bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana di Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.
6. Sejak tahun 2012 – 2014, Kepala Badan Ketahanan Pangan sebagai ketua *APEC-PPFS (Asia-Pacific Economic Cooperation – Policy Partnership on Food Security)* berhasil mengarahkan forum *APEC ini menyusun APEC-Food Security Road Map 2020*.
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan dinobatkan menjadi Tokoh Anti Korupsi Kementerian Pertanian Tahun 2013 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
8. Badan Ketahanan Pangan untuk tahun 2013 mendapatkan penghargaan sebagai Tim Satlak SPI terbaik kedua, serta seluruh Eselon II lingkup BKP mendapatkan penghargaan wilayah bebas dari korupsi. Tahun 2014 mendapatkan penghargaan sebagai Tim Satlak SPI terbaik kedua, serta seluruh Eselon II lingkup BKP mendapatkan penghargaan wilayah bebas dari korupsi.
9. Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2013 - 2014 berhasil memperoleh kategori “putih” dalam Peta Rawan Korupsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
10. Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 wilayah putih hasil penilaian Inspektorat Jenderal;

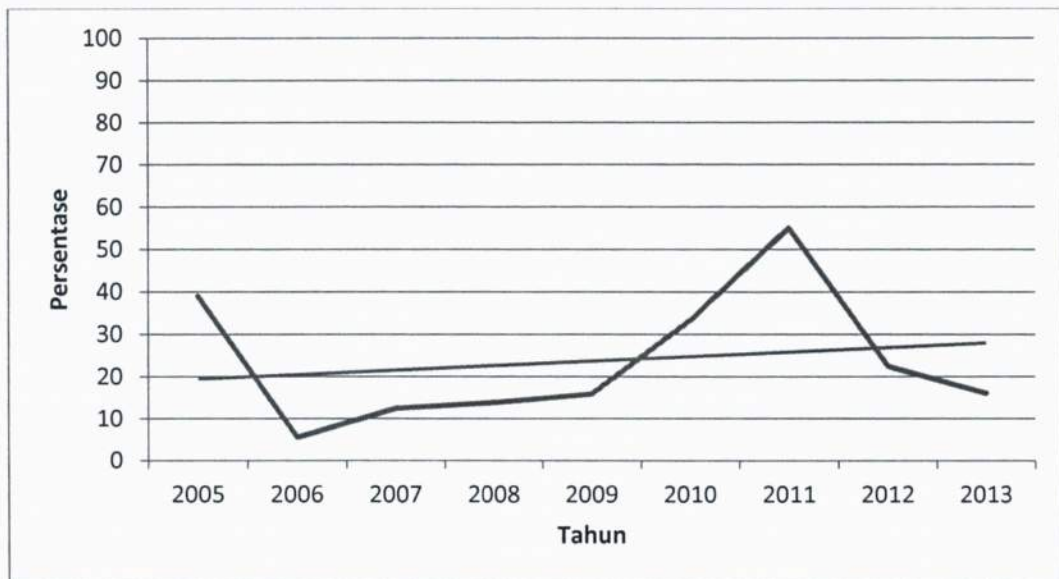
11. Tahun 2014, 3 (tiga) dari 4 (empat) eselon II Lingkup Badan Ketahanan Pangan predikat WBK.

Selain capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Badan Ketahanan Pangan juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan lainnya yaitu kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang mendukung kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Badan Ketahanan Pangan (BKP) dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011. Selanjutnya, Permentan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa salah satu tugas pada BKP diantaranya menyelenggarakan fungsi pengawasan keamanan pangan segar. Sehubungan dengan itu, untuk menjalankan fungsi tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan keamanan pangan segar, antara lain pengambilan contoh pangan segar dan pengujian di laboratorium. Objek pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan oleh BKP difokuskan pada pangan segar asal tumbuhan di peredaran. Mandat pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) khususnya dalam mengawal lalu lintas pangan segar asal tumbuhan dari dan ke luar negeri. Pengawasan keamanan pangan segar asal hewan secara khusus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Ruang lingkup pengujian adalah residu pestisida, mikroba dan logam berat. Pengujian residu pestisida sudah dilaksanakan sejak tahun 2005. Namun sejak tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan Kementan tidak melakukannya, sehingga data yang diperoleh adalah data pengujian yang dilakukan oleh BKP Daerah. Berdasarkan pengujian residu pestisida di laboratorium, menunjukkan bahwa kandungan residu pestisida yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada

pangan segar mengalami tren yang meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 12 di bawah ini.

Grafik 12. Hasil Pengujian Pangan Segar yang TMS dari Residu Pestisida.



Sumber : Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pada grafik 12 di atas, pangan segar yang tidak memenuhi syarat sejak tahun 2005 sampai dengan 2013 adalah 38.89 %, 5.56 %, 12.50 %, 13.89 %, 15.91%, 33.33 %, 55.0 %, 22.50 %, dan 16.08 %. Pangan segar tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat, dikarenakan mengandung residu pestisida yang dilarang atau di atas ambang batas. Standar yang digunakan dalam menentukan apakah contoh memenuhi syarat atau tidak adalah SNI 7313 : 2008, Codex Alimentarius dan Permentan Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas.

Mengingat keamanan pangan sangat penting dalam peningkatan kualitas manusia, maka diperlukan petugas/SDM di bidang pengawasan keamanan pangan yang memiliki kompetensi yang terstandarkan. Beberapa kompetensi untuk petugas yang menangani keamanan pangan segar sudah merujuk pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar kompetensi profesi, yaitu SKKNI Pengawas Keamanan Pangan Segar dan SKKNI Petugas Pengambil Contoh (PPC) pangan segar. Untuk memenuhi

kompetensi petugas yang menangani keamanan pangan, BKP telah melatih petugas dengan berbagai kompetensi dari tahun ke tahun, hingga tahun 2014 petugas yang menangani keamanan pangan, sebagai berikut : (1) PPC sebanyak 295 orang; (2) Auditor sebanyak 92 orang; (3) Inspektur sebanyak 36 orang; (4) PMHP sebanyak 20 orang; (5) PPNS sebanyak 20 orang; dan (6) Pengawas sebanyak 61 orang. Uraian petugas keamanan pangan per provinsi dapat dilihat pada **lampiran 7**.

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan keamanan pangan segar di Indonesia, banyak tantangan yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan, antara lain: (1) Cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas; (2) jumlah dan jenis pangan segar cukup beragam; (3) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan produsen untuk memproduksi pangan yang aman dan bermutu; (4) Kesadaran konsumen dan retail yang masih perlu ditingkatkan; dan (5) Keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas keamanan pangan segar. Dari kelima tantangan tersebut, butir ke 1 dan 2 menunjukkan bahwa diperlukan penguatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan kendaraan operasional yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengawasan keamanan pangan segar seperti pengambilan sampel dan wahana respon cepat terhadap kejadian ketidakamanan pangan (seperti terjadinya kasus keracunan pangan segar) serta sarana pendukung untuk penyebaran informasi tentang keamanan pangan di daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan telah mengalokasikan anggaran untuk kendaraan pengawasan keamanan pangan segar yang sangat penting dalam mendukung kinerja pengawasan keamanan pangan segar. Mobil pengawas keamanan pangan segar sebagai kendaraan operasional telah diadakan di 27 provinsi, sedangkan 6 (enam) provinsi tidak mendapatkan alokasi adalah : DKI Jakarta, Bali, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua.

C. Realisasi Anggaran

Pada awal TA. 2014 Badan Ketahanan Pangan (BKP) memperoleh alokasi anggaran senilai Rp. 529,185 milyar untuk kegiatan di pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian pada tahun berjalan terjadi penghematan pagu anggaran sebesar Rp. 70,211 milyar untuk subsidi BBM, dan penambahan anggaran untuk kontingensi Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada bulan Agustus 2014 ada penambahan 1 milyar untuk kegiatan Fortifikasi Beras, sehingga pagu akhir anggaran tahun 2014 sebesar Rp.459,974 milyar.

Seluruh anggaran Tahun 2014 dialokasikan dalam 164 satker berupa : (a) Dana Sentralisasi di Pusat Rp. 81,704milyar atau 17,76persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 33 propinsi Rp.198,503 milyar atau 43,15 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp. 179,76milyar atau 39,08 persen. Untuk kabupaten/kota yang tidak berdiri sendiri/satker mandiri, anggarannya masuk dalam provinsi melalui dana dekonsentrasi.

Alokasi anggaran per kegiatan utama pada tahun 2014sebelum dan sesudah penghematan adalah pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2014**(Rp. 000)**

NO	Kegiatan	PAGU AWAL	PEMOTONGAN	PAGU AKHIR
1	Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	69.738.150	20.570.558	49.167.592
2	Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	77.327.000	8.665.031	68.661.969
3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	197.972.750	34.448.042	163.524.708
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	184.147.000	5.527.691	178.619.309
TOTAL		529.184.900	69.211.322	459.973.578

Sumber : Badan Ketahanan Pangan

Tabel 17. Alokasi dan Realisasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2014 Setelah Penghematan.

Rp. Milyar

No	Uraian	2013			2014		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pusat	75,29	60,10	79,82	81,70	66,39	81,26
2	Daerah	571,87	546,01	95,48	378,27	352,82	91,14
	Provinsi	392,73	359,78	95,95	213,22	196,76	78,17
	Kab/Kota	179,14	186,23	94,58	165,04	156,06	94,55
	TOTAL	647,16	606,11	93,66	459,97	419,21	91,14

Sumber : SAU

Realisasi Anggaran Pengembangan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2014 mencapai 91,14 persen, realisasi anggaran untuk bantuan sosial mencapai realisasi tertinggi sebesar 96,88 persen dan belanja pegawai mencapai realisasi terendah sebesar 73,99 persen. Realisasi anggaran menurut jenis belanja, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 18. Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah per Jenis Belanja pada TA.2014.

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA DANA (Rp.)
		(Rp.)	(%)	
TOTAL PUSAT DAN DAERAH	459.973.578.000	419.219.423.614	91,14	40.754.154.386
KANTOR PUSAT	81.704.481.000	66.392.597.963	81,26	15.311.883.037
Pusat Distribusi	6.771.593.000	5.968.462.320	88,14	803.130.680
Pusat Ketersediaan	7.059.723.000	6.519.774.285	92,35	539.948.715
Pusat Konsumsi	11.630.943.000	10.709.446.193	92,08	921.496.807
Total Sekretariat Badan	56.242.222.000	43.208.940.575	76,83	13.033.281.425
- Sekretariat Badan	42.389.616.000	34.537.340.243	81,48	7.852.275.757
- SOLID	7.173.822.000	3.088.822.657	43,06	4.084.999.343
- DKP	6.678.784.000	5.568.752.265	83,38	1.110.031.735
DAERAH	378.269.097.000	352.826.825.651	93,37	25.442.271.349
Dekonsentrasi	198.502.647.000	187.663.754.354	94,54	10.836.892.655
Tugas Pembantuan (Propinsi)	14.721.410.000	9.097.207.760	61,80	5.624.202.240
Tugas Pembantuan (Kab/Kota)	165.045.040.000	156.065.863.546	94,55	8.979.176.454

Sumber : Badan Ketahanan Pangan

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh :

1. Masih lemah koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran di pusat dan daerah;
2. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran).
3. Satuan kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan proses mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan sehingga sering menghambat untuk meneruskan pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan keterlambatan penyerapan belanja;
4. Kurang memahami mekanisme pencairan anggaran;
5. Adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;
6. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;
7. Kegiatan menggunakan sumber dana pinjaman luar negeri;
8. Adanya kegiatan PILKADA, PILPRES dan PILEG;
9. Pelaksanaan pada tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme yang sangat kompleks sehingga sangat hati-hati;
10. Terjadi revisi anggaran hampir 3 kali dalam setahun yang diakibatkan oleh perubahan akun anggaran, adanya tanda bintang "blokir" dan kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan;
11. Dengan penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.
12. Kawasan Mandiri Pangan : 2 (dua) kawasan tidak terbentuk karena tidak sesuai dengan CPCL, yaitu: Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, dan Rote Barat;
13. Pelaksanaan SOLID : Pengadaan konsultan firm belum kontrak, karena ada perubahan komposisi tenaga ahli dan di rencanakan bulan Januari 2015; dan Pengadaan Internasional Konsultan Value Chain belum mendapatkan kandidat;
14. Ada 5 (lima) gapoktan tahap pengembangan yg tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan persyaratan masuk tahap pengembangan;

15. Ada 2 (dua) kawasan di kab Rote Ndao yg tdk mencairkan krn wilayah tdk sesuai dg Pedum atau tdk sesuai dengan CP/CL;
16. Ada 36 kab yang tdk melaksanakan SKPG karena adanya pengembalian penghematan sehingga waktu pelaksanaan sudah di akhir tahun (bulan Oktober/November).

Tabel 19. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014

	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Renstra	397.68	618.97	722.27	829.86	940.92
Pagu	397.68	628.97	687.84	647.16	458.55
Realisasi	365.14	560.82	621.25	605.93	419.93

Sumber : Badan Ketahanan Pangan

Grafik 13. Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Pagu Renstra dan Pagu Anggaran Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014



Sumber : Badan Ketahanan Pangan

Alokasi anggaran BKP dalam DIPA selama 5 tahun sebesar Rp. 2,820 Trilyun atau 78,22% dari anggaran Renstra selama 5 tahun sebesar Rp. 3,605 Trilyun. Rata – rata realisasi anggaran DIPA selama 4 tahun sebesar 91,28% atau 66,93% terhadap renstra selama 5 tahun.

D. Dukungan Instansi Lain.

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan nasional, dipengaruhi pula oleh peranserta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan

Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 43 tahun 2009, instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan Ketahanan Pangan. Adapun kegiatan instansi lain yang mendukung keberhasilan ketahanan pangan seperti pada **lampiran 8**.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Pelaksanaan program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tahun 2014, secara khusus telah berhasil menimbulkan perubahan di wilayah/kelompok sasaran. Program tersebut berhasil : (a) membangun kesadaran kelompok sasaran untuk mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) mewujudkan stabilitasi harga gabah/ beras, dan jagung di wilayah gapoktandan masyarakat melalui Penguatan LDPM; (c) pemenuhan kebutuhan pangan lingkup kelompok Lumbung Pangan Masyarakat; serta (d) menurunkan KK miskin di Desa/Kawasan Mandiri Pangan.

Capaian IKU dan sasaran kegiatan utama secara umum sudah sesuai dengan Renstra kecuali pada tahun – tahun terakhir sebagai akibat kebijakan pemotongan anggaran dan *refocusing* program BKP. *Refocusing* diarahkan pada peningkatan kegiatan P2KP/KRPL dengan merealokasi anggaran pada kegiatan yang lain (Demapan, LDPM, dan LPM).

Berdasarkan capaian indikator kinerja, keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan target adalah : (1) skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 101,09 persen (sangat berhasil), dan (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebesar 114,17 persen (sangat berhasil); serta (3) Pengembangan Lembaga Distribusi dan Stabilisasi Harga yaitu Penguatan LDPM sebesar 93,05 persen (berhasil), Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebesar 100 persen (berhasil). Indikator lainnya yaitu penurunan penduduk rawan pangan, penurunan konsumsi beras, belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan/masalah baik secara umum maupun teknis pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD daerah dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

B. Hambatan, Kendala dan Upaya dan Tindak Lanjut

1. Hambatan dan Kendala

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2014 adalah : (1) pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat; (7) terdapatnya konsep makan “belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat; (8) pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Sedangkan berdasarkan aspek ketahanan pangan, hambatan dan kendala capaian kinerja program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tahun 2014 adalah :

a. Aspek Ketersediaan Pangan

- 1) Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas.
- 2) Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan restoran.
- 3) Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energi dan pakan ternak.
- 4) Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya pangan yang

rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.

b. Aspek Keterjangkauan Pangan

- 1) Sifat produksi yang musiman, berpengaruh terhadap harga pangan.
- 2) Melonjaknya harga pangan dunia karena ketergantungan terhadap ekspor pangan tertentu.
- 3) Terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.
- 4) Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut, mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun.
- 5) Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar.

c. Aspek Konsumsi Pangan

- 1) Keterbatasan kemampuan ekonomi atau daya beli dari keluarga;
- 2) Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, serta teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai social, citra, dan daya terima;
- 3) Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, karena pengaruh globalisasi industri pangan siap saji, dan berkurangnya produksi sumber pangan lokal;
- 4) Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- 5) Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman;
- 6) Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, serta penerapan saksi yang tegas;
- 7) Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal;

- 8) Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

d. Dukungan Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan.

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya;
- 2) Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pegawai sering;
- 3) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan manual;
- 5) Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program;
- 6) Belum sepenuhnya terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

Secara teknis program dan kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Perubahan nomenklatur dan adanya kebijakan penghematan, menyebabkan keterlambatan revisi dan kekeliruan akun.
2. PDRP termasuk dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan & bencana. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa ada kabupaten/kota yang mengalami kejadian bencana, Badan Ketahanan Pangan tidak dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung karena sejak tahun 2013 sudah tidak ada kegiatan penyaluran bansos untuk wilayah yang terkena bansos. Sehingga Badan ketahanan Pangan hanya mengoptimalkan Tim SKPG sebagai deteksi dini kejadian kerawanan pangan dan bencana. Namun pelaksanaan SKPG belum berjalan secara optimal dan hasil deteksi dini dari SKPG kurang ditindaklanjuti pada tahun 2013.
3. Mutasi Pejabat daerah, sehingga mengalami keterlambatan dalam penetapan Surat Keputusan KPA atau PPK terhadap kegiatan strategis.

4. Jarak tempuh lokasi KPPN untuk TP kegiatan Desa Mapan yang di Provinsi sehingga menyulitkan proses pencairan dana apabila terjadi kesalahan,
5. Proses pencairan terhadap kab/kota yang menginduk Provinsi terkendala kesalahan pengadministrasian, infrastruktur transportasi.
6. Kegiatan fortifikasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan ruang lingkup kegiatan yang belum disetujui ADB.
7. *Mindset* petugas tentang keberhasilan kinerja instansi dan program masih seputar realisasi keuangan, sedangkan realisasi fisik masih belum dianggap penting;
8. Petugas kegiatan evaluasi yang merangkap dengan kegiatan lain;
9. Seringnya terjadi mutasi pejabat/pegawai di daerah;
10. Keterlambatan dan kurang berkelanjutan pelaporan evaluasi khususnya laporan fisik kegiatan;
11. Belum semua kabupaten/kota yang menggunakan aplikasi Simonev;
12. Website ketahanan pangan belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal; dan
13. Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat.

2. Upaya dan Tindak Lanjut

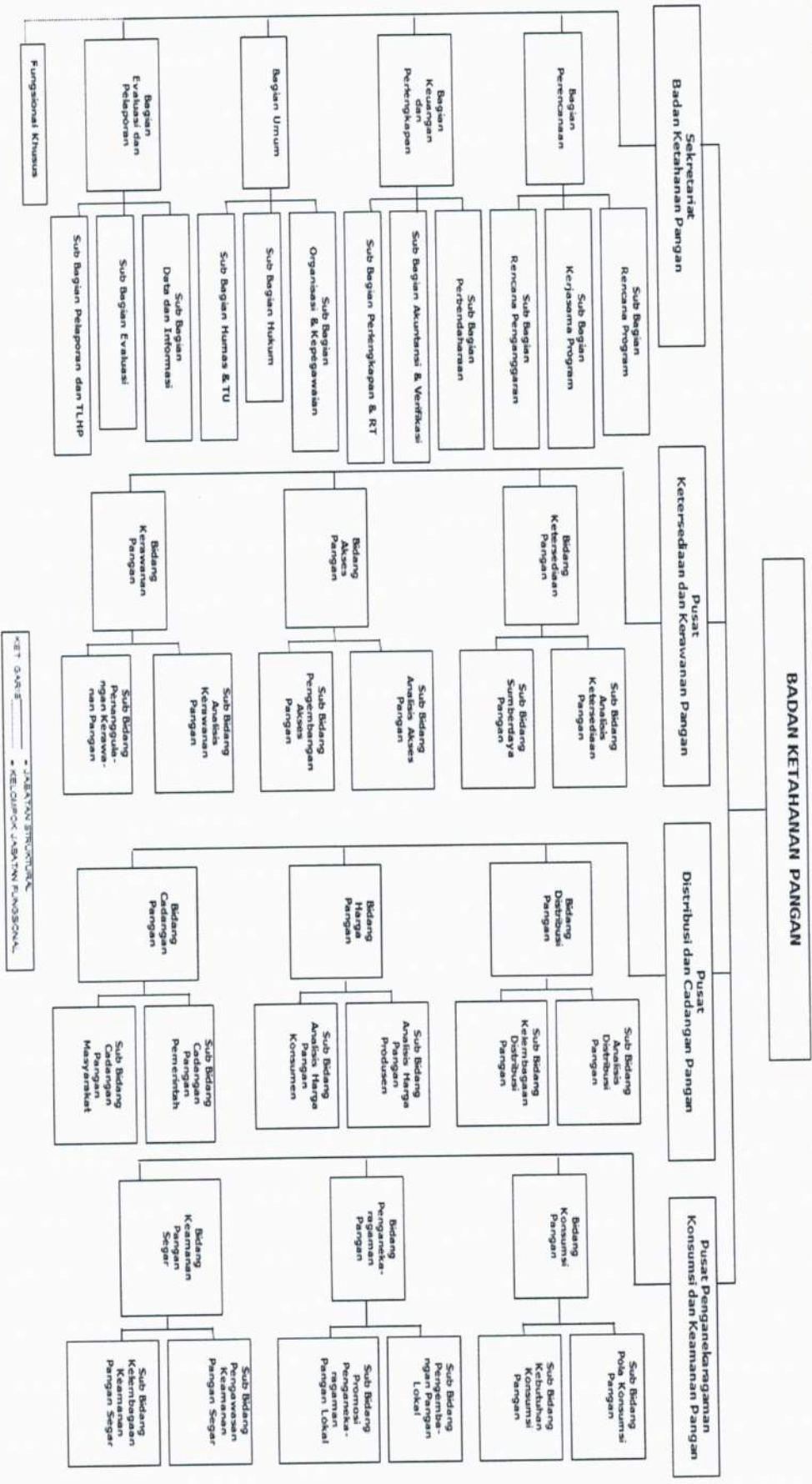
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) BKP Pusat telah menghimbau kepada Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kab/Kota untuk dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan SKPG dan PDRP. Hal ini berkaitan dengan dukungan anggaran, program, dan SDM, sehingga dapat menguatkan berbagai instrument yang ada di dalam SKPG dan PDRP.
- 2) BKP berupaya memberikan informasi dan sosialisasi tentang perubahan nomenklatur dan penghematan kepada daerah.

- 3) Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional,
- 4) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal,
- 5) Peningkatan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya,
- 6) Sinkronisasi kebijakan baik antarkementerian maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung,
- 7) Mengembangkan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL,
- 8) Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L),
- 9) Perlu upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan.
- 10) Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya lokal,
- 11) Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui: fasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi pelaku usaha pangan terutama usaha rumah tanggadan UMKM.
- 12) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha (bekerja sama dengan Ditjen PPHP), pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan



• JABATAN STRUKTURAL
• KELUARGA LABINTAN FUNKSIONAL

Lampiran 2. Kegiatan dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 Sebelum Revisi

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
11.	<u>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</u>	Meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, distribusi dan pemberdayaan tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.	<p>▶ % Realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan.</p> <p>▶ % Realisasi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang.</p> <p>▶ % Realisasi penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat.</p> <p>▶ % Realisasi pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan</p>	90	90	95	95	100	397,68	618,97	719,87	827,46	938,52	3.502,49	

Lampiran 3. Kegiatan dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 Revisi

TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
11.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Penurunan penduduk rawan pangan per tahun ▶ Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan ▶ Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun ▶ Pengembangan Lembaga Distribusi Stabilisasi Pangan Pokok 	1% 86,4	1% 88,1	1% 89,8	1% 91,5	1% 93,3	397,68	618,97	763,28	858,49	967,31	3.605,71	
				750 Gap/800 LB	900 Gap/700 LB	1.250 Gap/800 LB/6 CPP	1.500 Gap/900 LB/12 CPP	1.750 Gap/1.000 LB/17 CPP							

Lampiran 4. Rata-rata Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2009-2014

Kelompok Pangan	2010		2011		2012		2013		2014		Ideal	
	Energi	% AKG	Energi	% AKG	Energi	% AKG	Energi	%AKG	Energi	%AKG	Energi	% AKG
a. Padi-padian	1205	60,2	1223	61,2	1155	57,7	1164	58,2	1.164	58.2	1.000	50,0
b. Umbi-umbian	47	2,3	54	2,7	41	2,0	39	1,9	38	1,9	120	6,0
c. Pangan hewani	178	8,9	186	9,3	183	9,1	174	8,7	183	9,2	240	12,0
d. Minyak dan lemak	229	11,5	232	11,6	241	12,1	233	11,6	243	12,1	200	10,0
e. Buah/biji berminyak	52	2,6	47	2,4	43	2,1	39	1,9	38	1,9	60	3,0
f. Kacang-kacangan	63	3,2	61	3,0	59	2,9	58	2,9	57	2,8	100	5,0
g. Gula	109	5,5	105	5,2	91	4,5	93	4,7	90	4,5	100	5,0
h. Sayur dan buah	108	5,4	104	5,2	100	5,0	96	4,8	101	5,0	120	6,0
i. Lain-lain	34	1,7	36	1,8	32	1,6	35	1,8	36	1,8	60	3,0
Total	2025	101,2	2048	102,4	1944	97,2	1930	96,5	1.949	97.5	2000	100
Skor PPH	85,7		85,6		83,5		81,4		83.4		100	

Sumber : Susenas 2010 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP

Lampiran 5. Perkembangan Konsumsi per Komoditas Tingkat Nasional 2010 – 2014

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi									
	gram/kap/hari					Kg/kap/thn				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
I. Padi-padian										
a. Beras	273,1	278,7	264,6	263,9	263,5	99,7	101,7	96,6	96,3	96,2
b. Jagung	5,6	4,3	5,1	4,5	4,2	2,0	1,6	1,9	1,6	1,5
c. Terigu	28,0	29,6	27,0	27,7	28,2	10,2	10,8	9,8	10,1	10,3
II. Umbi-umbian										
a. Singkong	25,8	28,3	20,6	18,6	17,9	9,4	10,3	7,5	6,8	6,5
b. Ubi jalar	6,8	8,3	6,8	6,9	7,5	2,5	3,0	2,5	2,5	2,7
c. Kentang	5,2	4,4	4,1	4,4	4,2	1,9	1,6	1,5	1,6	1,5
d. Sagu	1,0	1,4	1,2	1,2	1,1	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
e. Umbi lainnya	1,1	1,9	1,3	1,1	1,1	0,4	0,7	0,5	0,4	0,4
III. Pangan Hewani										
a. Daging ruminansia	5,2	6,1	8,5	4,9	5,2	1,9	2,2	3,1	1,8	1,9
b. Daging unggas	13,7	14,5	13,4	13,8	15,1	5,0	5,3	4,9	5,0	5,5
c. Telur	22,0	21,7	21,3	20,0	20,3	8,0	7,9	7,8	7,3	7,4
d. Susu	6,2	6,4	5,1	6,4	6,7	2,3	2,3	1,9	2,3	2,4
e. Ikan	55,1	57,7	53,6	53,4	55,3	20,1	21,1	19,5	19,5	20,2
IV. Minyak dan Lemak										
a. Minyak kelapa	5,0	4,7	3,2	3,3	2,6	1,8	1,7	1,2	1,2	0,9
b. Minyak sawit	20,0	20,5	23,3	22,2	23,9	7,3	7,5	8,5	8,1	8,7
c. Minyak lainnya	0,6	0,6	0,4	0,5	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
V. Buah/biji berminyak										
a. Kelapa	8,2	7,4	6,8	6,0	5,9	3,0	2,7	2,5	2,2	2,2
b. Kemiri	1,3	1,3	1,0	1,1	1,1	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
VI. Kacang-kacangan										
a. Kedelai	21,0	22,7	21,2	21,3	21,4	7,7	8,3	7,8	7,8	7,8
b. Kacang tanah	1,6	1,0	0,8	0,9	0,8	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
c. Kacang hijau	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
d. Kacang lain	0,5	0,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
VII. Gula										
a. Gula pasir	27,3	26,2	23,0	23,6	22,7	10,0	9,6	8,4	8,6	8,3
b. Gula merah	2,6	2,6	1,9	1,9	1,8	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7
VIII. Sayuran dan buah										
a. Sayur	169,1	167,5	162,8	156,0	163,4	61,7	61,1	59,4	56,9	59,6
b. Buah	95,7	79,7	86,6	82,9	92,9	34,9	29,1	31,6	30,2	33,9
IX. Lain-lain										
a. Minuman	41,2	45,9	45,7	47,6	49,3	15,0	16,7	16,7	17,4	18,0
b. Bumbu-bumbuan	10,0	10,4	9,9	9,6	9,6	3,6	3,8	3,6	3,5	3,5

Lampiran 6. Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2014

No	Provinsi	Target			Realisasi			%
		Pengembangan	Kemandirian	Jml	Pengembangan	Kemandirian	Jml	
1	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
2	Banten	0	1	1		1	1	100
3	Jawa Barat	0	1	1		1	1	100
4	Jawa Tengah	0	40	40		40	40	100
5	DIY	-	-	-	-	-	-	-
6	Jawa Timur	5	60	65	5	60	65	100
7	Aceh	1	11	12	1	11	12	100
8	Sumatera Utara	13	13	26	13	13	26	100
9	Sumatera Barat	17	7	24	17	7	24	100
10	Riau	5	0	5	5	0	5	100
11	Jambi	0	6	6		6	6	100
12	Sumatera Selatan	0	20	20		20	20	100
13	Bengkulu	0	6	6		6	6	100
14	Lampung	21	11	32	21	11	32	100
15	Bangka Belitung	4	0	4	4		4	100
16	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
17	Kalimantan Barat	2	7	9	2	7	9	100
18	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
19	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
21	Sulawesi Utara	1	5	6	1	5	6	100
22	Sulawei Tengah	16	12	28	16	12	28	100
23	Sulawesi Selatan	0	4	4		4	4	100
24	Sulawesi Tenggara	0	1	1		1	1	100
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
27	Bali	-	-	-	-	-	-	-
28	N T B	0	5	5		5	5	100
29	N T T	0	8	8		8	8	100
30	Maluku	0	3	3		3	3	100
31	Maluku Utara	5	4	9	5	4	9	100
32	Papua Barat	3	2	5	3	2	5	100
33	Papua	1	6	7	1	6	7	100
Total		94	233	327	94	233	327	100

Lampiran 7. Tenaga Pengawas Keamanan Pangan Segar

No	Propinsi	PPC	Auditor	Inspektor	PMHP	PPNS	Pengawas
1	Pemerintah Aceh	9	3	1	0	1	3
2	Sumatera Utara	6	2	0	0	0	1
3	Sumatera Barat	6	2	0	2	0	2
4	Riau	9	2	0	0	0	1
5	Kepulauan Riau	2	2	0	0	0	2
6	Jambi	6	1	0	0	0	2
7	Bengkulu	5	2	0	0	0	2
8	Sumatera Selatan	13	4	2	0	0	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	13	5	0	3	1	1
10	Lampung	7	6	1	0	0	2
11	Banten	5	2	0	0	0	2
12	DKI Jakarta	4	2	0	0	0	2
13	Jawa Barat	25	5	2	3	0	1
14	Jawa Tengah	16	4	6	0	3	2
15	DI Yogyakarta	7	2	0	2	0	3
16	Jawa Timur	15	2	0	0	0	2
17	Bali	6	4	4	3	1	1
18	NTB	4	2	0	0	0	2
19	NTT	24	2	3	2	1	2
20	Kalimantan Selatan	7	5	0	0	0	2
21	Kalimantan Barat	7	3	0	0	0	1
22	Kalimantan Tengah	8	2	1	0	0	4
23	Kalimantan Timur	8	3	0	2	0	1
24	Sulawesi Utara	10	3	0	0	0	3
25	Sulawesi Tengah	16	6	4	0	7	1
26	Sulawesi Barat	3	3	0	0	1	3
27	Sulawesi Selatan	19	3	11	3	2	2
28	Sulawesi Tenggara	11	2	1	0	1	2
29	Gorontalo	4	2	0	0	0	0
30	Maluku	6	2	0	0	0	2
31	Maluku Utara	5	2	0	0	0	1
32	Papua	3	1	0	0	0	2
33	Papua Barat	6	1	0	0	2	2
	TOTAL	295	92	36	20	20	61

Lampiran 8. Dukungan Instansi Lainnya

No	Kementerian/Eselon I	Kegiatan
1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan • Percepatan penerbitan Inpres Pangkin (Pangan untuk Masyarakat Miskin)
2	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan • Subsidi untuk daerah rawan pangan
3	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan pusat dan peraturan daerah terkait program diversifikasi pangan • Mendukung upaya diversifikasi melalui program Penyediaan Makanan Tambahan – Anak Sekolah (PMT-AS) berbasis Sumber Daya Lokal
4	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penataan kerjasama pemasaran • Mendorong sosialisasi/ promosi diversifikasi pangan kepada masyarakat • Dukungan pelaksanaan kampanye diversifikasi pangan dalam rangka promosi pangan lokal/spesifik daerah melalui pameran pangan nusa
5	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah terutama komoditas pertanian • Dukungan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi masyarakat/kelompok wanita dan peternakan • Kebijakan pengembangan industri pengolahan pangan • Dukungan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi masyarakat/kelompok wanita
6	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi
7	Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi komoditas pertanian di hutan produksi dan hutan kemasyarakatan
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi perikanan • Kebijakan penetapan score konsumsi ikan • Sosialisasi konsumsi ikan • Litbang teknologi budidaya dan pengolahan
9	Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan evaluasi kebijakan perencanaan program ketahanan pangan • Dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam mendukung upaya diversifikasi pangan • Dukungan kebijakan ekonomi makro (fiskal & moneter), misal subsidi sarana pertanian untuk komoditas non beras • Dukungan kebijakan pembiayaan tentang pertanian dan ketahanan pangan termasuk kerjasama dengan luar negeri

No	Kementerian/Eselon I	Kegiatan
10	Kementerian Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha tani menjadi kelembagaan koperasi • Dukungan modal/pinjaman bagi kelompok pengolahan pangan lokal dan pelatihan tentang pengolahan pangan lokal
11	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan cinta pangan lokal dan diversifikasi pangan dalam kurikulum sekolah
12	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan memasyarakatkan konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang • Kebijakan penetapan Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan dan kebutuhan pangan perorangan menurut kelompok umur
13	Kementerian Riset dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan lahan • Pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka diversifikasi pangan
14	Kementerian Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan memasyarakatkan diversifikasi pangan melalui media • Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat
15	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan peningkatan peran perempuan melalui kelompok wanita tani
16	BPOM	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengawasan produk pangan olahan hasil pertanian • Pengawasan produk pangan yang tidak aman dan tidak sehat
17	BMKG	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana dan arahan penentuan masa tanam dan jenis tanaman yang cocok di masing-masing daerah
18	Kementerian Pertanian :	
	a. Ditjen Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi • Sosialisasi/gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu sebagai alternatif sumber karbohidrat
	b. Ditjen Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan • Sosialisasi/gerakan konsumsi sayur dan buah-buahan • Dukungan benih/bibit sayuran dan buah untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan

No	Kementerian/Eselon I	Kegiatan
	c. Ditjen PPHP	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu • Dukungan pelatihan bagi kelompok/UMKM penghasil pangan lokal, pemberian bantuan alat untuk pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu, dukungan promosi dan pemasaran produk pengembangan pangan lokal melalui <i>exhibition</i> dan penyelenggaraan festival terkait pangan lokal
	d. Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> • Perizinan sarana/prasarana promosi diversifikasi pangan
	e. Badan Litbang Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan • Teknologi pengayaan gizi melalui fortifikasi pangan dan pengolahan pangan yang bergizi tinggi dan bernilai ekonomi • Dukungan teknologi peningkatan produksi hasil pekarangan dan pangan local
	f. BPSDMP	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan terkait dengan pola konsumsi yang B2SA • Penurunan konsumsi beras dan peningkatan PPH agar masuk dalam buku pintar penyuluhan • Dukungan pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan
	g. BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan • Dukungan teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, termasuk pengayaan nilai gizi pangan melalui fortifikasi pangan
	h. BPSBP (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura
	i. BPPTPH (Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura dalam mengelola pemanfaatan pekarangan
	j. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerepan Teknologi)	<ul style="list-style-type: none"> • Adopsi teknologi pengolahan pangan (mesin penepungan, pembuatan mie) • Dukungan teknologi tepat guna dalam kegiatan model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) di daerah dengan menghasilkan mesin pengolahan beras analog

No	Kementerian/Eselon I	Kegiatan
19	Lembaga	
	a. Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian modal usaha melalui kredit usaha atau pinjaman lunak dengan bunga rendah, khususnya pengolahan pangan lokal non beras dan non terigu
	b. Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan melalui media cetak/elektronik, <i>event organizer</i>, dan lain-lain
	c. BUMN	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan bahan baku yang mendukung usaha pertanian • membantu promosi diversifikasi pangan
20	TP PKK	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal • Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga melalui program HATINYA (Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) PKK • Partisipasi aktif dalam kegiatan KRPL dan pangan lokal melalui keteladanan, misal : istri Gubernur, Bupati, dll
21	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Mitra dalam pengadaan konsultansi, penyediaan tenaga tim ahli, penyelenggaraan kajian penelitian dan pengembangan konsumsi pangan • Inovasi teknologi dan hasil penelitian • Penyebarluasan teknologi serta pengembangan teknologi yang mendukung diversifikasi pangan
22	Pemda (Prov, Kab/kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut Perpres No 22 tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal dengan menerbitkan Pergub, Perbup/Perwali termasuk Surat Edaran atau Himbauan • Dukungan kebijakan untuk turut melaksanakan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan • Penguatan kelembagaan ketahanan pangan termasuk penyuluhan • Pelatihan bagi aparat dan kelompok terhadap kegiatan pengembangan pangan lokal - pangan olahan – pekarangan • Kebijakan pengaturan fungsi lahan/tata guna lahan • Mendirikan usaha/badan usaha yang mendukung peningkatan ketahanan pangan, misal pabrik mocaf untuk menampung hasil panen pangan lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
23	Instansi terkait dalam jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) dan Daerah (JKPD)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan, kajian, kampanye dan promosi, pembinaan, dan pengawasan Keamanan Pangan secara terpadu

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ESELON I : BADAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS	PENCAPAIAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMAUJUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	A Penurunan Konsumsi Beras Per Kapitan Tiap Tahun	1,50 %	0					Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publih pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	
	1 Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698 Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa				20	1. Sosialisasi Pedoman, 2. Penetapan CP/CL, 3. Proses Pencairan, 4. Sebagian sudah cair untuk desa lama.	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Primilhan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
	2 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	9 Provinsi	0				5	Sosialisasi dan Persiapan dokumen		
		21 Kab/Kota	0							
	3 Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33 Provinsi	0				5	Sosialisasi		

B	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3																Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publikasi pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6.698	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa					20		1. Sosialisasi Pedoman, 2. Penetapan CP/CL, 3. Proses Pencairan, 4. Sebagian sudah cair untuk desa lama.	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pemilihan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.								
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	9	Provinsi	0					5		Sosialisasi dan Persiapan dokumen									
		21	Kab/Kota	0																
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33	Provinsi	0					5		Sosialisasi									

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ESELON I : BADAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PKI)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMAUJUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	A Penurunan Penduduk Rawan Pangan Per Tahun		0					Penurunan penduduk rawan pangan akan terlihat pada triwulan IV	Data penduduk miskin tergantung data BPS dan data penduduk rawan pangan sangat tergantung data susenas yang akan publih pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
	1 Kawasan Mandiri Pangan	13 Provinsi	0				10 Tahap Sosialisasi dan Persiapan CP/CL	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah pemilihan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.		
	2 Pengembangan Lumbung Pangan	109 Kawasan 652 Lumbung	0				10 Tahap Sosialisasi dan Persiapan CP/CL			

	B	Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun	1,50	%	0													Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publik pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	
		1 Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698	Desa	0	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa												20 1. Sosialisasi Pedoman, 2. Penetapan CP/CL, 3. Proses Pencairan, 4. Sosialisasi dan Persiapan dokumen	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pemilihan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
		2 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	9	Provinsi	0													5 Sosialisasi dan Persiapan dokumen	Ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	
		3 Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33	Provinsi	0													5 Sosialisasi	Ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	
	C	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3		0													Penurunan penduduk rawan pangan akan terlihat pada triwulan IV	Data penduduk miskin tergantung data BPS dan data penduduk rawan pangan sangat tergantung data susenas yang akan publik pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	

1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa											20	1. Sosialisasi Pedoman, 2. Penetapan CP/CL, 3. Proses	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pimilihan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM Menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	9	Provinsi	0											5	Sosialisasi dan Persiapan dokumen		
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33	Provinsi	0											5	Sosialisasi		
D	Stabilnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya		Sesuai dengan HPP	0											10	Tahap Sosialisasi dan Persiapan CP/CL	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pimilihan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
	1 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	417	Gapoktan	0											10	Tahap Sosialisasi dan Persiapan CP/CL		
	2 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	652	Lumbung	0											10	Tahap Sosialisasi dan Persiapan CP/CL		

	E Stabilitasnya harga beras di tingkat produsen	CV < 10 %	0						30 Tahap pengolahan data harga dari daerah dan pusat.	1. Keterlambatan data harga dari daerah karena petugas yang menangani pemantauan harga daerah ada yang berubah, sehingga laporan kondisi harga Triwulan I baru selesai awal bulan Mei.	1. Peningkatan pengetahuan pemantauan harga kepada petugas lain, 2. Kunjungan Petugas Harga BKP Pusat ke daerah/lapangan
	1 Laporan Kondisi Harga	34 Laporan	0					30 Tahap pengolahan data harga dari daerah dan pusat.	1. Keterlambatan data harga dari daerah karena petugas yang menangani pemantauan harga daerah ada yang berubah, sehingga laporan kondisi harga Triwulan I baru selesai awal bulan Mei.	1. Peningkatan pengetahuan pemantauan harga kepada petugas lain, 2. Kunjungan Petugas Harga BKP Pusat ke daerah/lapangan	

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ESELON I : BADAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI				KEMAUJUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	A Penurunan Konsumsi Beras Per Kapitan Tiap Tahun	1,50	%						Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publik pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	
	1 Pemberdayaan kelompok wanita PZKP	6,698	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	desa baru 141 desa lama 59			30,00	1. Sosialisasi Pedoman, 2. Penetapan CP/CL, 3. Proses Pencairan, 4. Sebagian sudah banjos setelah pemilihan cair Legislatif. 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan banjos setelah pemilihan cair Legislatif. 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
	2 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	9	Provinsi					10,00	Sosialisasi dan Persiapan dokumen		
		21	Kab/Kota								
	3 Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33	Provinsi					35,49	Sosialisasi		

B	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3																Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV		
1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa								30,00	1. Sosialisasi Pedoman, 2. Penetapan CP/CL, 3. Proses Pencapaian, 4. Sebagian sudah cair untuk desa lama.	Data sangat tergantung data susenas yang akan publih pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaa				
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	9	Provinsi										10,00	Sosialisasi dan Persiapan dokumen	1. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM					
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33	Provinsi										35,49	Sosialisasi	1. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.					

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ESELON I : BADAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMAUJUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	KETERANGAN	
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV			PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	A	1	Jumlah penduduk rawan pangan 47.020.098 jiwa (19,04%)	-				Penurunan penduduk rawan pangan di publish angka triwulan I dan III		
	Kawasan Mandiri Pangan	13	Provinsi	0	0		20,00	Tahap Sosialisasi dan Persiapan GP/CL	data penduduk rawan pangan sangat tergantung data susenas (BPS) yang akan publish pada triwulan I dan III	
		109	Kawasan	0	0				1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pemilihan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ESELON I : BADAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI					KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT	
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV						
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	A Penurunan Konsumsi Beras Per Kapitan Tiap Tahun	1,50 %	0					53,02	Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publinh pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM dan Silabi sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.	
			1	6,698	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	desa baru 141 desa lama 59					desa baru 1.031 desa lama 2.291
			2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	16-Jan Provinsi	0	0					16
	3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33	Provinsi	0	0	33	100,00				
	B	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3						Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publinh pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV		

1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 1.030 Desa, Desa Lama : 2291 Desa			53,02	1. Proses Pencairan, 2. Sebagian sudah cair untuk desa lama dan desa baru.	1. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pimlithan Legislatif, 2. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 3. Dengan sistem SPAM dan Silabi menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM dan Silabi sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	16	Provinsi	0	0	16			100,00			
		21	Kab/kota	0	0	21						
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33	Provinsi	0	0	33 prov			100,00			

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ESELON I : BADAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMAUJUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	A Penurunan Penduduk Rawan Pangan Per Tahun	1 %	Jumlah penduduk rawan pangan 47.020.098 jiwa (19,04%)	-	-	-	100,00	Penurunan penduduk rawan pangan di publish angka triwulan I dan III	data penduduk rawan pangan sangat tergantung data susenas (BPS) yang akan publish pada triwulan I dan III	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
	1 Kawasan Mandiri Pangan	13 Provinsi	0	0	13		54,12	Proses Pencairan Desa Mandiri Pangan		
	2 Pengembangan Lumbung Pangan	652 Lumbung	0	Penetapan kelompok, Tahap Mandiri : 4 kel, Tahap Pengembangan : 15 kel	Penetapan kelompok, Tahap Mandiri : 227 kel, Tahap Pengembangan : 77 kel		93,58	Proses Pencairan Lumbung Pangan		
	B Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun	1,50 %	0	0	0			Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publish pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	

1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,69 8	Desa	Desa Baru : 16, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa Lama : 59	Desa Baru : 1.030 Desa Lama : 2.291	53,20	1. Sosialisasi Pedoman, 2. Penetapan CP/CL, 3. Proses Pencairan, 4. Sebagian sudah cair untuk desa lama.	1. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah pemilihan Legislatif, 2. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 3. Dengan sistem SPAM dan Silabi menyebabkan banyak permasalahan pencatran anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	9	Provinsi	0	0	0	10,00			
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	21	Kab/kota	0	0	0				
		33	Provinsi	0	0	33	100,00	Sosialisasi		
C	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3		0	0	0		Skor PPH....	Data penduduk miskin tergantung data BPS dan data penduduk rawan pangan sangat tergantung data susenas yang akan publih pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	
1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,69 8	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa Lama : 59	Desa Baru : 1.030 Desa Lama : 2.291	53,20	1. Sebagian sudah cair untuk desa lama dan desa baru.	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah pemilihan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	16- Jan	Provinsi	0	0	16	100,00	Sosialisasi dan Persiapan dokumen		

3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	21	Kab/kota	0	0	21	100,00	ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM dan silabi menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.		
D	Stabilnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya		Sesuai dengan HPP	0	0	0				
1	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	417	Gapoktan	0	37 Tahap Peningkatan dan 78 Tahap Pengembangan	0	88,00	Tahap Pencairan	1. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pimlilhan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
2	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	652	Lumbung	0	sda. LPM	LPM	93,58	Tahap Pencairan		
E	Stabilnya harga beras di tingkat produsen		CV < 10 %	0	CV = 8,09%	CV = 8,14%	75,00	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan data panel harga pangan BKP, sampai dengan bulan September 2014 (Tri III), rata-rata <i>coefisien variant</i> (CV) harga beras medium ditingkat 	1. Masih adanya kejadian harga beras (medium) ditingkat pengendalian yang dibawah HPP (Rp 6.600/kg), terutama pada bulan September (Mgg I-IV) di Provinsi Sulawesi Tenggara;	1. Meningkatkan akses informasi harga beras ke tingkat petani;

								<p>penggilingan sebesar 8,14%, yang berarti harga beras masih stabil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata harga tertinggi dan terendah terjadi pada bulan September; yaitu Rp 8.862/Kg (tertinggi di Kalimantan Tengah) dan Rp 6.388/Kg (terendah di Sulawesi Tenggara). • Dibanding kondisi sampai Tri II, CV pada Tri III mengalami kenaikan, yang berarti kondisi harga beras tingkat produsen lebih berfluktuasi. • Rincian nilai CV harga beras bulanan: <ul style="list-style-type: none"> Maret 6,20%, April 7,22%, Mei 7,79%, Juni 11,16%, Juli 7,97%, Agustus 7,92%, dan September 8,71%. 	<p>2. Masih adanya perbedaan harga beras yang cukup besar antar wilayah dan antar waktu yang membuat nilai CV pada minggu atau bulan tertentu menjadi besar sehingga kondisi harga cukup berfluktuasi;</p> <p>3. Belum semua kabupaten mengirimkan data perkembangan harga beras secara rutin (mingguan) ke Pusat.</p>	<p>2. Meningkatkan pengiriman laporan/data harga beras di tingkat produsen (penggilingan) dari daerah ke Pusat.</p> <p>3. Antisipasi peningkatan harga gabah/beras pada akhir tahun (Oktober-Desember) mengingat bukan musim panen, sehingga berdampak pada fluktuasi harga beras baik di produsen maupun konsumen.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1	Laporan Kondisi Harga	34	Laporan	0	34	34 Lap.			75,00	<ul style="list-style-type: none"> Data harga pangan strategis yang diperoleh dari enumerator di tingkat konsumen (pasar) dan dittingkat produsen (petani/penggiat/penggiat). Laporan mingguan yang direkap menjadi laporan bulanan dan triwulanan tentang harga pangan sudah tersedia dari 33 provinsi dan 1 pusat, dan akan diupdate setiap triwulan. 	<p>1. Belum semua kabupaten/kota dari provinsi mengirimkan data perkembangan harga pangan secara rutin (mingguan) ke Pusat;</p> <p>2. Adanya pergantian petugas enumerator sehingga pengiriman data kurang lancar;</p> <p>3. Masih adanya data yang kurang valid sehingga perlu divalidasi dan diolah kembali;</p> <p>4. Masih sering terjadi keterlambatan pengiriman laporan dari daerah.</p>	<p>1. Meningkatkan pengendalian pemantauan harga kepada petugas daerah yang lain;</p> <p>2. Pemantauan, pengendalian dan validasi data harga oleh petugas harga BKP Pusat/ Provinsi ke lapangan.</p>								

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ESELON I : BADAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	A Penurunan Konsumsi Beras Per Kapitan Tiap Tahun	1,50 %	0					Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publih pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	
1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698	Desa Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	desa baru 141 desa lama 59	desa baru 1.031 desa lama 2.291	53,02	1. Proses Pencapaian, 2. Sebagian sudah cair untuk desa lama dan desa baru.	1. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah pemilihan Legislatif, 2. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 3. Dengan sistem SPAM dan Silabi menyebabkan banyak permasalahan pencapaian anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM dan Silabi sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.	
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	16- Jan Provinsi	0	0	16	100,00				
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33 Provinsi	0	0	33	100,00				
B	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3						Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV		

1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 1.030 Desa, Desa Lama : 2291 Desa	1.335	86,96	1. Proses Pencairan lancar, 2. Sebagian sudah cair untuk desa lama dan desa baru.	1. Adanya arahan penurunan percepatan bansos setelah pemilihan Legislatif, 2. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 3. Dengan sistem SPAM dan Silabi menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKR Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM dan Silabi sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	16	Provinsi	0	0	16		100,00			
		21	Kab/Kota	0	0	21					
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	33	Provinsi	0	0	33 prov		100,00			

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ESELON I : BADAN KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS	PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI				KEMAJUAN PELAKSANAAN (%)	KETERANGAN	PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV				
Meningkatnya Diversifikasi Pangan	A Penurunan Penduduk Rawan Pangan Per Tahun	1 %	Jumlah penduduk rawan pangan 47.020.098 jiwa (19,04%)	-	-					
1	Kawasan Mandiri Pangan	13	Provinsi	0	0	13	100,00	Konsumsi beras menurun dari 96,3 kg (2013) menjadi 96,2 kg (2014) atau sebesar 0,1%. Dengan adanya peningkatan standar kebutuhan rata-rata konsumsi energi dari 2000 menjadi 2150, menyebabkan kebutuhan energi dari beras akan vunderung stagnan (persentase penurunannya kecil)	data penduduk rawan pangan sangat tergantung data susenas (BPS) yang akan publish pada triwulan I dan III	
2	Pengembangan Lumbung Pangan	652	Lumbung	0	0	70	93,58	Proses Pencatiran Mandiri Pangan Proses Pencatiran Lumbung Pangan	Belum semuanya provinsi menyerahkan SP2D ke pusat	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendahharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
		109	Kawasan	0	0	59	64	Proses Pencatiran Mandiri Pangan		

B	Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun	1,50	%	0	0	0	0	0	53,20	Penurunan konsumsi beras akan terlihat pada triwulan IV	Data sangat tergantung data susenas yang akan publih pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.
1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698	Desa	Desa Baru : 16, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa Lama : 59	Desa Baru : 1.030 Desa Lama : 2.291	0	0	10,00	1. Sosialisasi Pedoman, 2. Penetapan CP/CL, 3. Proses Pencairan, 4. Sebagian sudah cair untuk desa lama.	1. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pimilihan Legislatif, 2. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 3. Dengan sistem SPAM dan Silabi menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	9	Provinsi	0	0	0	0	0				
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	21	Kab/Kota	0	0	0	0	0				
		33	Provinsi	0	0	33			100,00	Sosialisasi		

C	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa Lama : 59	Desa Baru : 1.030 Desa Lama : 2.291	0	0	0	0	53,20	Skor PPH meningkat dari tahun 2013 (81,4) menjadi 83,4 pada tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan target 93,3 maka skor tersebut baru dicapai oleh penduduk dengan pengeluaran rata-rata perkapita diatas Rp. 750.000,-. Skor PPH rata-rata nasional belum mencapai target karena konsumsi pangan hewani, buah dan sayur masih rendah	Data penduduk miskin tergantung data BPS dan data penduduk rawan pangan sangat tergantung data susenas yang akan publih pada triwulan III dan diolah oleh BKP pada triwulan IV	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendahhara n melalui rekonsiliasi anggaran.
1	Pemberdayaan kelompok wanita P2KP	6,698	Desa	Desa Baru : 16 Desa, Desa Lama : 59 Desa	Desa Baru : 141 Desa Lama : 59	Desa Baru : 1.030 Desa Lama : 2.291	0	0	0	0	100,00	1. Sebagian sudah cair untuk desa lama dan desa baru.	1. Keterlambatan SK Pengelola Keuangan, 2. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah Pimilihan Legislatif, 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM dan Siliabi menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat, 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya, 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendahhara n melalui rekonsiliasi anggaran.
2	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	16-Jan	Provinsi	0	0	16	0	0	0	0	100,00	Sosialisasi dan Persiapan dokumen		
3	Sosialisasi dan Promosi melalui berbagai event dan lomba	21	Kab/Kota	0	0	21	0	0	0	0	100,00			
		33	Provinsi	0	0	33								

D	Stabilnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya		Sesuai dengan HPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	417	Gapoktan	0	37 Tahap Penumbuhan dan 78 Tahap Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	652	Lumbung	0	sda. LPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Stabilnya harga beras di tingkat produsen		CV < 10 %	0	CV = 8,09%	CV = 8,14%	CV = 7,96%	100,00		93,58	Tahap Pencairan	1. Adanya arahan penundaan percepatan bansos setelah pemilihan Legislatif. 3. Mutasi pegawai yang sangat cepat ditingkat daerah, 4. Dengan sistem SPAM menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran.	1. Koordinasi dengan BKP Pusat. 2. Percepatan anggaran difokuskan pada kegiatan lainnya. 3. Terkait SPAM sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan melalui rekonsiliasi anggaran.	1. Meningkatkan akses informasi harga beras ke tingkat petani;									

• Berdasarkan data panel harga pangan BKP, pada periode Oktober- Mingu II Desember 2014 (Triwulan IV), rata-rata *coefficient variant* (CV) harga beras medium ditingkat penggilingan sebesar 7,96%, yang berarti harga beras masih stabil. Apabila dibanding Triwulan III, kondisi harga pada Tri IV lebih stabil terlihat dari nilai CV Tri IV lebih rendah dari Tri III.

	1	Laporan Kondisi Harga	34	Laporan	0	34	34 Lap.			100,00	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata harga tertinggi terjadi pada bulan Desember (minggu II), yaitu Rp 9.200/kg (Kalimantan Barat), dan harga terendah pada bulan Oktober (Minggu II), yaitu Rp 6.300/kg (Sulawesi Tenggara). 	<p>1. Masih adanya perbedaan harga beras yang cukup besar antar wilayah dan antar waktu yang membuat nilai CV pada minggu atau bulan tertentu menjadi besar sehingga kondisi harga cukup berfluktuasi;</p> <p>Masih adanya petugas enumerater kabupaten yang tidak mengirimkan data perkembangan harga beras ditinjau produsen (penggilingan) secara rutin (mingguan) ke Pusat.</p>	<p>1. Masih adanya petugas enumerater (provinsi/ kab/kota) yang tidak mengirim data perkembangan harga pangan secara rutin (mingguan) ke Pusat.</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengiriman data harga.</p>			

										<p>Laporan mingguan yang direkap menjadi laporan bulanan dan triwulanan tentang harga pangan sudah tersedia dari 33 provinsi dan 1 pusat.</p>	<p>2. Masih adanya pergantian petugas enumerator sehingga pengiriman data harga menjadi terganggu (tidak rutin), dan</p> <p>3. Masih adanya data yang dikirim kurang valid, sehingga perlu divalidasi/ditolak kembali.</p>	<p>2. Validasi data harga oleh petugas harga BKP Pusat/ Provinsi.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**JL. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan
Tahun 2014**